

Tahun 2020



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM
DAN HAM JAWA TENGAH

Jalan Moch Ichsan, Kelurahan Wates,
Kec. Ngaliyan, Kota Semarang

 Badiklat Kumham Jateng

 badiklatjateng

 badiklatjateng

 badiklat-jateng.kemenkumham.go.id

lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan rahmatNya sehingga kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah ini dengan baik. Laporan kinerja ini disusun untuk memberikan deskripsi dan paparan atas kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020.

Laporan Kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah ini menjelaskan tentang rencana dan capaian kinerja serta penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun Anggaran 2020 pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah ini kami sampaikan, semoga laporan ini bisa dijadikan bahan evaluasi dan pertimbangan Pimpinan untuk meningkatkan strategi dan target kinerja pada tahun 2020. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Semarang, 22 Januari 2021

Kepala,



Kaswo

NIP. 19740426 199903 1 001



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GRAFIK	v
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Visi, Misi dan Tujuan	2
C. Tugas dan Fungsi	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sumber Daya Manusia	6
F. Peran Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	7
G. Sistematika Penyajian	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis (Renstra)	10
B. Perjanjian Kinerja	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja	18
1. Pendidikan dan Pelatihan	18
1.1. Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat TA 2020	18
1.2. Pelatihan Teknis Pemasarakatan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar dengan Metode E-Learning TA 2020	35
1.3. Pelatihan Teknis Pemasarakatan Pengamanan Tingkat Lanjutan TA 2020	45
1.4. Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian TA 2020 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	54
1.5. Pelatihan Teknis Rating Jaga Navigasi TA 2020	55
1.6. Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XX TA 2020 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	58
1.7. Pelatihan Teknis Protokoler	59
1.8. Pelatihan Public Speaking	64
2. Kemenkumham Corporate University	65
2.1. Community of Practise (CoP)	66
2.2. Podcast	71



2.3. Webinar	71
3. Pembangunan Gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	72
B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama.....	78
C. Kendala atau Hambatan dan Langkah Penyelesaiannya	79
D. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah	80
E. Capaian Realisasi Anggaran	82
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Rencana Tindak Lanjut	89
LAMPIRAN.....	90



DAFTAR GRAFIK

<i>Grafik 1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin</i>	<i>7</i>
<i>Grafik 2. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan</i>	<i>7</i>

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Wilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	<i>4</i>
<i>Tabel 2. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024.....</i>	<i>11</i>
<i>Tabel 3. Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 4. Sasaran Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah 2020-2024.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja</i>	<i>80</i>
<i>Tabel 6. Penyerapan Anggaran Tahun 2020</i>	<i>82</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan</i>	<i>83</i>



BAB I
PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Salah satu unsur penting yang harus dimiliki dalam berdirinya suatu organisasi/instansi adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia inilah yang akan mengelola organisasi tersebut agar dapat terus berjalan dan berkembang. Namun agar dapat dikelola dengan baik maka diperlukan sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah di bawah naungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kepada para pegawai agar mempunyai kemampuan dan kompetensi yang baik di bidangnya masing-masing. Berdasarkan tugas tersebut maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dimaksudkan sebagai wujud kewajiban Balai



Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Laporan ini juga diharapkan dapat menjadi sarana penilaian dan perbaikan bagi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah di masa mendatang.

B. Visi, Misi dan Tujuan

Kementerian Hukum dan HAM mempunyai **visi** yaitu :

“Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Makna dari visi ini adalah Kepastian hukum dimaksudkan agar hukum di Negara Indonesia tetap terjaga integritasnya, kepastian hukum dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak boleh saling bertentangan, mengikat masyarakatnya dan mengarahkan masyarakat berperilaku positif sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Untuk mencapai visi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM menetapkan **misi** sebagai berikut:

- ❖ Mewujudkan peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional.
- ❖ Mewujudkan pelayanan hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- ❖ Mewujudkan penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas, dan pertumbuhan ekonomi nasional.
- ❖ Mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan.

Guna mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan, maka dibutuhkan tata nilai yang dijadikan sebagai pedoman bagi seluruh Aparatur Kementerian Hukum dan HAM, yaitu dengan menjunjung nilai **PASTI** :

Profesional : Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;



Akuntabel : Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;

Sinergi : Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;

Transparan : Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

Inovatif : Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sementara itu **tujuan** yang ingin dicapai Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah:

Terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia pada Kementerian Hukum dan HAM di daerah.

C. Tugas dan Fungsi

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Kepala Divisi Administrasi.

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM mempunyai **tugas** menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pelaksanaan tugas tersebut disesuaikan dengan wilayah kerjanya masing-masing. Saat ini telah dibentuk tiga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM



di Indonesia, yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara. Pembagian wilayah kerja dari masing-masing Balai Pendidikan dan Pelatihan tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Wilayah Kerja Balai Diklat Hukum dan HAM

No	Nama	Lokasi	Wilayah Kerja
1	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Kepulauan Riau	Batam, Kepulauan Riau	Provinsi : 1. Aceh 2. Sumatera Utara 3. Sumatera Barat 4. Sumatera Selatan 5. Riau 6. Kepulauan Riau 7. Jambi 8. Bangka Belitung
2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	Provinsi : 1. Jawa Tengah 2. D.I. Yogyakarta 3. Jawa Timur 4. Kalimantan Barat 5. Kalimantan Selatan 6. Kalimantan Tengah 7. Kalimantan Timur 8. Kalimantan Utara 9. Bali 10. Nusa Tenggara Barat 11. Nusa Tenggara Timur
3	Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Sulawesi Utara	Bitung, Sulawesi Utara	Provinsi : 1. Sulawesi Selatan 2. Sulawesi Utara 3. Sulawesi Tengah 4. Sulawesi Tenggara 5. Sulawesi Barat 6. Gorontalo 7. Maluku 8. Maluku Utara 9. Papua 10. Papua Barat

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah menyelenggarakan **fungsi** sebagai berikut :

1. penyusunan rencana, program, dan anggaran pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
2. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
4. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

D. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.



E. Sumber Daya Manusia

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dipimpin oleh Kepala Balai Diklat dengan membawahi 3 (tiga) orang Pejabat Pengawas dan didukung oleh para Pelaksana.

1. 1 (satu) orang Kepala Balai Diklat;
2. 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. 2 (dua) orang Kepala Seksi :
 - Kepala Seksi Penyelenggaraan
 - Kepala Seksi Program dan Evaluasi

Jabatan	Jumlah
Eselon III	1 orang
Eselon IV	3 orang
JFU	8 orang
JFT	2 orang
Jumlah	14 orang

Sebagaimana struktur organisasi di atas, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh 14 ASN dengan berbagai latar belakang pendidikan yang mendukung kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah.

Pembagian tugas dan wewenang Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah terdiri atas:

1. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, anggaran, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, tata kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi, hubungan masyarakat, fasilitasi reformasi birokrasi, pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan, penyusunan laporan akuntansi keuangan dan akuntansi barang milik negara, dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, serta urusan rumah tangga Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

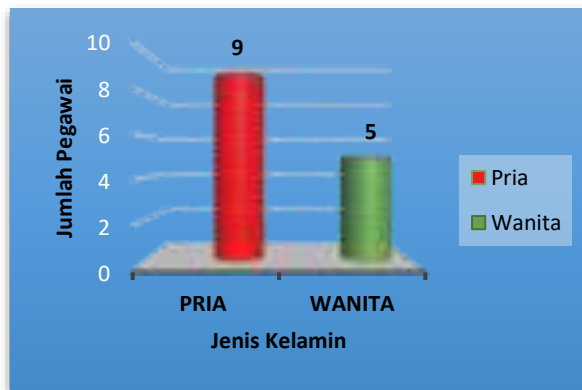
2. Seksi Program dan Evaluasi

Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas penyiapan dan penyusunan rencana, program, dan kerja sama, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di

bidang hukum dan hak asasi manusia, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan diklat di wilayah.

3. Seksi Penyelenggaraan

Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia.



Grafik 1. Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin (per 31 Desember 2020)



Grafik 2. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan (per 31 Desember 2020)

F. Peran Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 04 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Diklat Hukum dan Hak Asasi Manusia telah diatur bahwa Balai Diklat Hukum dan HAM mempunyai tugas untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Tugas yang diemban tersebut tentunya memiliki peran yang sangat strategis dalam mengembangkan kompetensi ASN.

G. Sistematika Penyajian

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I – Pendahuluan, menyajikan informasi mengenai latar belakang penyusunan LKIP serta tugas, fungsi dan struktur organisasi Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah;



Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai perencanaan kinerja yang meliputi sasaran strategis, indikator kinerja utama, target dan program kerja, serta informasi mengenai anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020;

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan ringkasan mengenai pengukuran kinerja dan penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020;

Bab IV – Penutup, menyajikan ringkasan mengenai tinjauan pelaksanaan kegiatan dan kinerja Tahun Anggaran 2020 yang dirangkum ke dalam kesimpulan terhadap Akuntabilitas Kinerja serta Rencana Tindak Lanjut.



BAB II
PERENCANAAN KINERJA



A. Rencana Strategis (Renstra)

Dalam melaksanakan tugas dan pembangunan di bidang hukum dan HAM, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai visi, misi, dan tujuan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024 itu sendiri merupakan panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan hukum serta kemajuan hak asasi manusia, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu-isu strategis yang mencakup pembangunan bidang hukum dan hak asasi manusia, yang diintegrasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian. Tahun 2020-2024 diharapkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang semakin baik serta profesional, aparatur negara di pusat dan daerah semakin mampu mendukung pembangunan nasional seperti yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2017.

Sasaran strategis adalah merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Kementerian Hukum dan HAM sebagai suatu *outcome/impact* dari beberapa tujuan yang hendak dicapai serta visi misi yang akan diwujudkan. Kemenkumham menetapkan sasaran strategis tahun 2020-2024 yang dituangkan dalam tabel di bawah sebagai berikut:



*Tabel 2. Sasaran Strategis Kemenkumham 2020-2024
(Sumber: Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024)*

Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
Pemangku Kepentingan	Sasaran Strategis 1 (SS1): Memastikan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan	Indeks kualitas perundang-undangan
	Sasaran Strategis 2 (SS2): Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM	1. Persentase institusi pusat yang melaksanakan program aksi HAM 2. Persentase institusi daerah yang melaksanakan program aksi HAM
Bisnis Internal Proses	Sasaran Strategis 3 (SS3): Memberikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Bidang Hukum
	Sasaran Strategis 4 (SS4): Melaksanakan penegakkan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreativitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional	1. Persentase permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi yang berhasil ditindaklanjuti
		2. Persentase peningkatan penyelesaian pelanggaran kekayaan intelektual secara tuntas
		3. Persentase mantan narapidana yang terampil dan bersertifikat
		4. Persentase tahanan mendapatkan perlindungan dan perawatan
		5. Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap
Sasaran Strategis 5 (SS5): Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI	1. Persentase menurunnya residivis 2. Persentase penegakkan hukum Keimigrasian yang maksimal	
Sasaran Strategis 6 (SS6): Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat	1. Presentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah 2. Persentase permohonan bantuan hukum yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	
Pembelajaran dan Pertumbuhan	Sasaran Strategis 7 (SS7): Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia Kementerian	1. Persentase ASN yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan



Perspektif	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
	Hukum dan HAM	2. Persentase alumni diklat yang meningkat kinerjanya
	Sasaran Strategis 8 (SS8): Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja dan pelayanan	1. Nilai Reformasi Birokrasi
		2. Nilai SAKIP
		3. Nilai Maturitas SPIP
		4. Opini Atas Laporan Keuangan
	5. Indeks Persepsi Korupsi	
	Sasaran Strategis 9 (SS9): Meningkatkan efektivitas organisasi	Indeks efektivitas organisasi
	Sasaran Strategis 10 (SS10): Meningkatkan pemanfaatan TI untuk layanan hukum dan HAM	Nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
Anggaran (Keuangan)	Sasaran Strategis 11 (SS11): Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien	1. Nilai SMART
		2. Nilai IKPA

Salah satu sasaran Kementerian Hukum dan HAM 2020-2024 adalah **Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di bidang Hukum dan HAM** (Sasaran Strategis 7, perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan). Dan sebagai implementasi dari bentuk pelaksanaan amanah tugas dan fungsi, serta dukungan bagi upaya pencapaian sasaran strategis tersebut, maka BPSDM Hukum dan HAM menetapkan tujuan strategisnya yaitu **Meningkatkan kinerja organisasi Kementerian Hukum dan HAM melalui pengembangan SDM berbasis Corporate University**.

Sasaran BPSDM Hukum dan HAM merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun atau sepanjang pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 ini. Dan dialokasikan secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Sasaran strategis disusun melalui pendekatan 4 perspektif *Balanced Scorecard*, yaitu:

1. Perspektif Pemangku Kepentingan
2. Perspektif Proses Internal
3. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan
4. Perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran

Sasaran strategis pada perspektif Pemangku Kepentingan mengacu kepada posisi seperti apa yang harus dicapai oleh organisasi di mata para pemangku kepentingannya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.



Sasaran strategis pada perspektif Proses Internal akan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi dalam hal proses bisnis internalnya dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sasaran strategis pada perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan mengacu kepada bagaimana atau seperti apa yang seharusnya dicapai dalam hal atribut, karakteristik, atau kinerja SDM dan kelembagaan organisasi dalam upaya mencapai tujuan strategisnya.

Sementara itu, sasaran strategis pada perspektif Keuangan atau Disiplin Anggaran akan mengacu kepada bagaimana seharusnya kinerja organisasi dalam hal keuangan atau disiplin anggaran.

Sasaran strategis BPSDM Hukum dan HAM dalam empat perspektif tersebut dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Sasaran Strategis BPSDM Hukum dan HAM 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi unit utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola)4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompentensi tinggi dan terkreditasi2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran3. Menjalani kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik
Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel



Sebagai Unit Pelaksana Teknis BPSDM Hukum dan HAM, maka sasaran strategis yang ditetapkan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM ialah :

Tabel 4. Sasaran Strategis Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah 2020-2024

Perspektif	Sasaran Strategis
Pemangku Kepentingan	Menjadi Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM melalui Kepala Divisi Administrasi utama yang dapat bekerjasama dalam pengembangan kompetensi SDM di bidang Hukum dan HAM dengan pemangku kepentingan
Proses Internal	<ol style="list-style-type: none">1. Menyelenggarakan program pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi berbasis TI2. Menyelenggarakan program pendidikan, pelatihan, pengembangan dan penilaian kompetensi yang berstandar global dan terakreditasi3. Mengelola pelatihan yang melibatkan 3 Pilar Pelatihan (WI, Penyelenggara, dan Pengelola)4. Memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang mutakhir5. Memiliki infrastruktur teknologi informasi untuk pendidikan dan pelatihan SDM yang berkualitas
Pembelajaran dan Pertumbuhan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki SDM fungsional dan penunjang yang berkompentensi tinggi dan terkreditasi2. Membentuk organisasi yang optimal dan efektif dalam menjalankan fungsi dan peran3. Menjalani kerjasama sinergis dengan institusi pendidikan dan pelatihan terbaik
Disiplin Anggaran	Memanfaatkan anggaran yang optimal, tepat sasaran dan akuntabel

B. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Kaswo, S.Sos

Jabatan : Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM
Jawa Tengah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Min Usihen, S.H., M.H

Jabatan : Ptl. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan
Hak Asasi Manusia

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya, sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Depok, Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala BPSDM Hukum dan HAM



Min Usihen
NIP.196903091994032001

Pihak Pertama
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Jawa Tengah



Kaswo
NIP.19740426 199903 1 001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
DENGAN KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Kantor Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	80%

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	Rp. 2.500.696.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp. 273.438.000,-
3.	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Rp. 39.900.000.000,-
4.	Layanan Perkantoran	Rp. 1.314.849.000,-
	Jumlah	Rp.43.988.983.000,-

Depok, Januari 2020

Pihak Kedua
Kepala BPSDM Hukum dan HAM

Mir Usihen
NIP.196903091994032001

Pihak Pertama
Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM
Jawa Tengah

Kaswo
NIP.197404261996031001



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA



A. Capaian Kinerja

Pada Tahun Anggaran 2020, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyelenggarakan kegiatan pelatihan baik secara luring maupun daring. Selain itu diwujukan Kemerkumham Corporate University, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah juga menyelenggarakan pembelajaran yang semakin menarik.

1. Pendidikan dan Pelatihan

1.1. Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat TA 2020

Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat dilaksanakan secara klasikal selama 4 (empat) hari mulai tanggal 17 – 20 Februari 2020 di Bapelkes Semarang yang diikuti oleh 61 peserta yang terbagi dalam 2 (dua) angkatan dari 10 Kantor Wilayah di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Peserta tersebut merupakan ASN yang bertugas sebagai pejabat/pegawai yang menangani bagian Pos Yankomas pada Kanwil (Divisi Pelayanan Hukum dan HAM)

atau pegawai yang dianggap mampu untuk mengembangkan kompetensi dalam bidang Yankomas.

Adapun tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman secara teknis tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat bagi peserta dalam pelaksanaan tugas sehingga peserta mampu memberikan masukan kepada masyarakat yang merasa hak asasinya terlanggar setelah menganalisa dugaan pelanggaran HAM dalam proses hukum dengan baik. Peserta dibekali dengan materi sebanyak 22 Jam Pelajaran (JP) dan 6 JP NS dengan menghadirkan para pengajar dari BPSDM Hukum dan HAM, Pimti Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan pengajar dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dengan metode pelatihan yang variatif seperti ceramah, diskusi, tanya jawab, praktik dan latihan.

Sebelum menyelenggarakan kegiatan tersebut, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan koordinasi terlebih dahulu guna menyinkronkan jalannya kegiatan sehingga dapat berjalan dengan baik, baik kepada BPSDM Hukum dan HAM maupun Bapelkes Semarang selaku lokasi pelaksanaan diklat.



Rapat koordinasi dengan Bapelkes Semarang



Registrasi peserta diklat



Pembelajaran dan pemberian materi kepada peserta diklat



Build Learning Commitment



Pembukaan Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Yankomas



Penutupan Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Yankomas

Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat

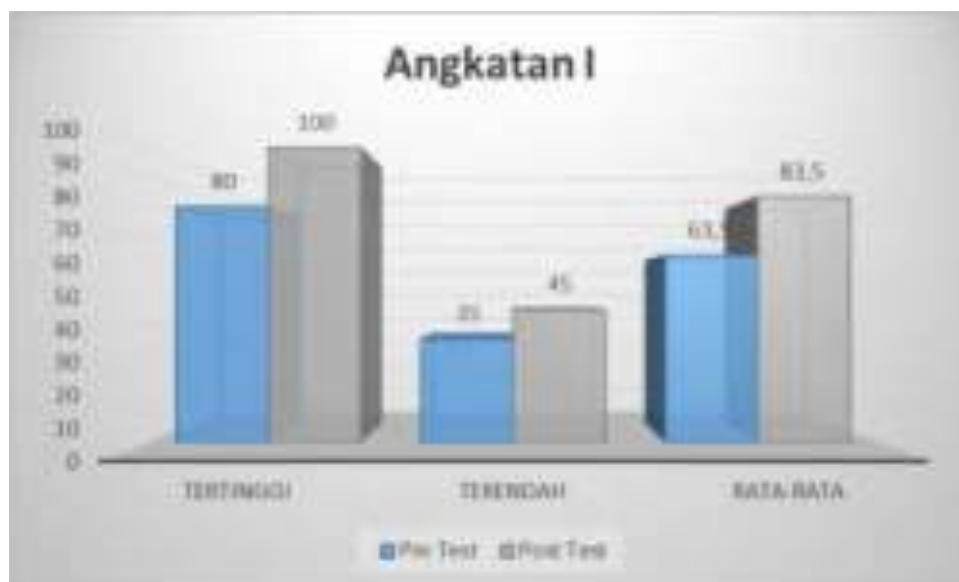
Capaian kegiatan Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	ANGGARAN	PENYERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat	17-20 Februari 2020	61 peserta	61 peserta	-	Rp 263.284.000	Rp 263.274.962

Hasil evaluasi Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat :

❖ *Pre Test dan Post Test*

Pre Test dan Post Test merupakan suatu rangkaian acara dalam proses pembelajaran pada suatu pelaksanaan Pelatihan Pendidikan. Adanya kegiatan Pre Test dan Post Test, tujuannya adalah terciptanya peningkatan penguasaan materi pengetahuan para seluruh peserta pelatihan dari apa yang telah disampaikan oleh pengajar dan narasumber selama proses pembelajaran berlangsung, sehingga tercapai hasil yang maksimal sesuai dengan target. Adapun hasil dari Pre Test dan Post Test tersebut dapat dilihat pada diagram dibawah ini:



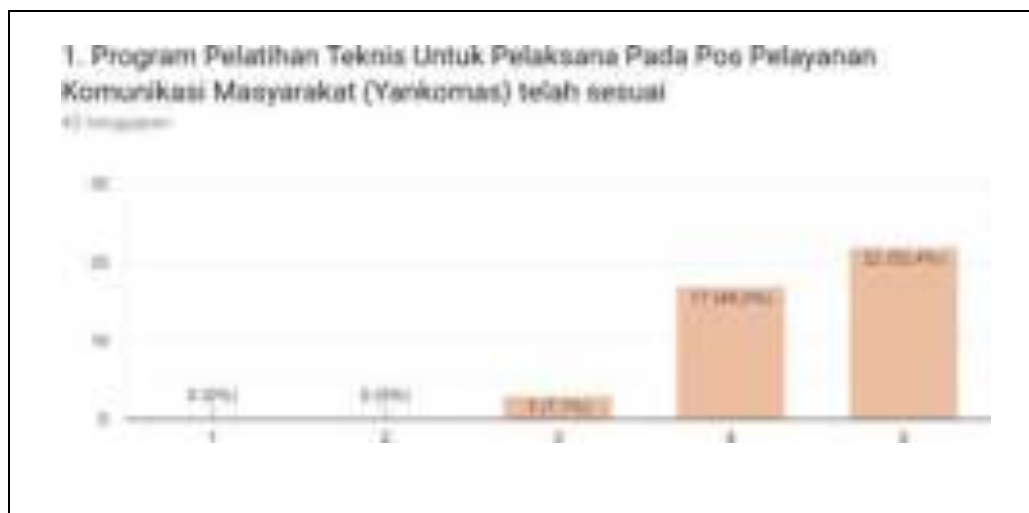
Dari hasil yang ditampilkan oleh gambar diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam sesi Pre Test dan Post Test Pelatihan Teknis Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat bahwa Nilai Rata-rata peserta naik masing – masing sebesar 24% pada setiap angkatan, sedangkan untuk rentang nilai terendah dan tertinggi dari setiap sesi yang diraih peserta menunjukkan ada peningkatan di angka 18%. Hal ini menunjukkan bahwa materi pembelajaran yang diberikan oleh para tenaga pengajar selama mengikuti diklat dapat diserap dengan baik oleh seluruh para peserta pelatihan.

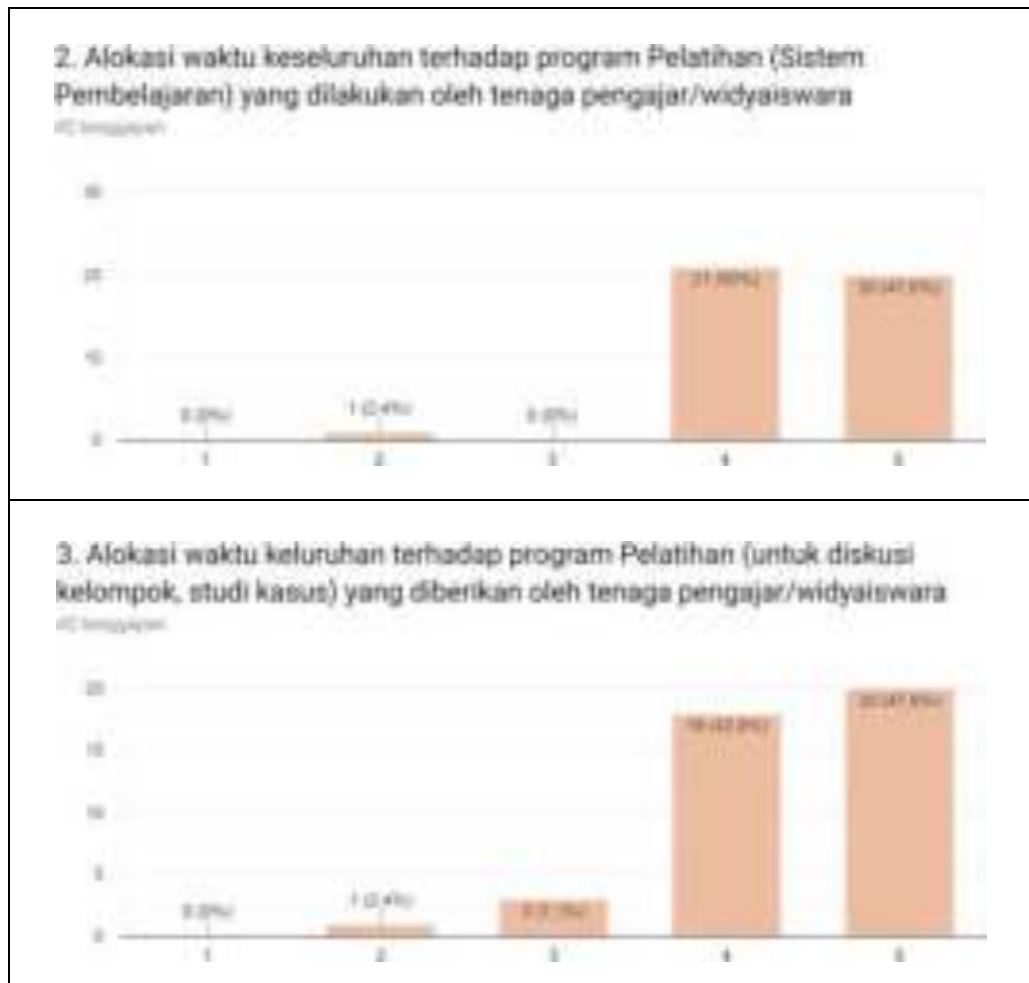
❖ Evaluasi Akhir Penyelenggaraan

Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai target terselenggaranya sebuah diklat dengan baik, agar hal tersebut dapat tercapai, evaluasi dalam setiap diklat yang dilaksanakan perlu dilakukan. Melalui pembagian kuisisioner kepada seluruh peserta pelatihan, diharapkan penilaian, kritik dan saran yang telah disampaikan para peserta mampu menjadikan sebuah masukan yang dapat membangun demi terlaksananya diklat yang lebih baik di waktu yang akan datang.

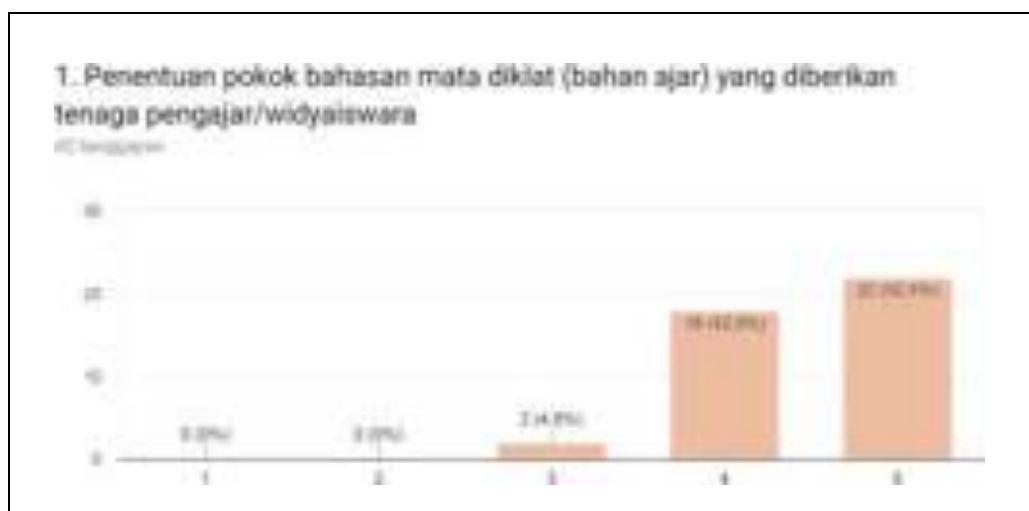
Berikut tanggapan dari koresponden kuisisioner Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Untuk Pelaksana Pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat TA 2020:

✓ Program Diklat



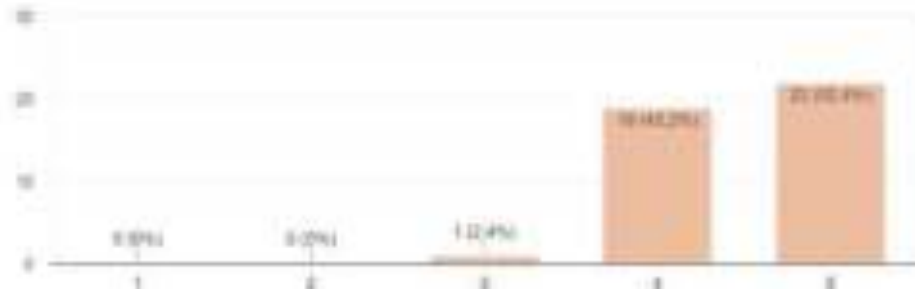


✓ Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan



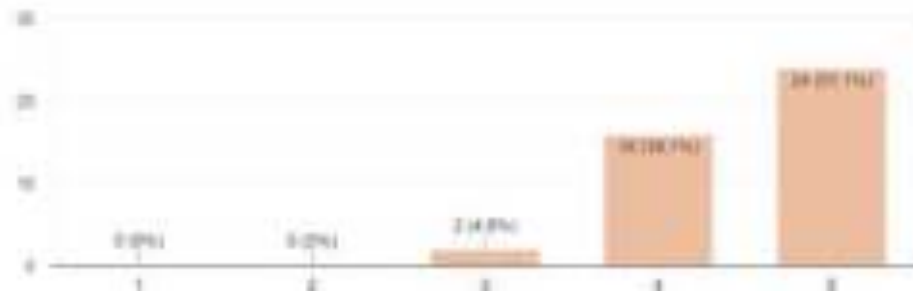
2. Isi materi setiap mata diklat (bahan ajar)

40 tanggapan



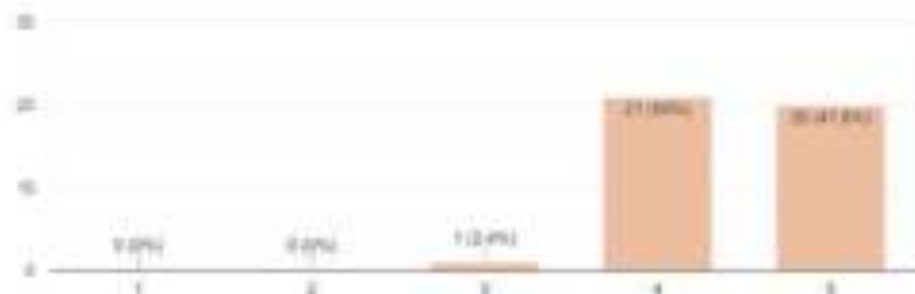
3. Kesesuaian materi dengan tujuan diklat

40 tanggapan

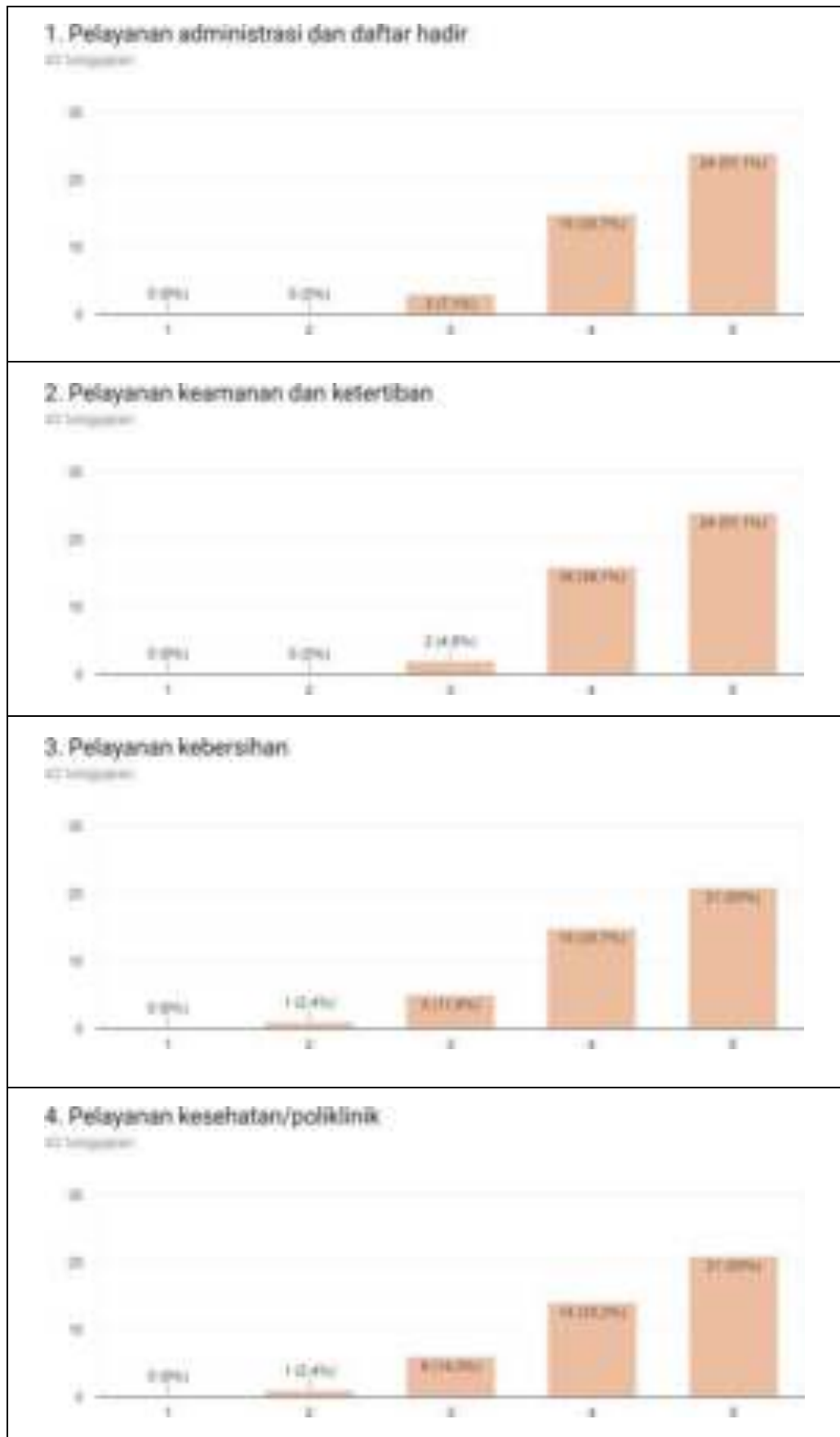


4. Penggunaan metodologi tiap mata diklat yang dilakukan oleh tenaga pengajar/widyaiswara

40 tanggapan

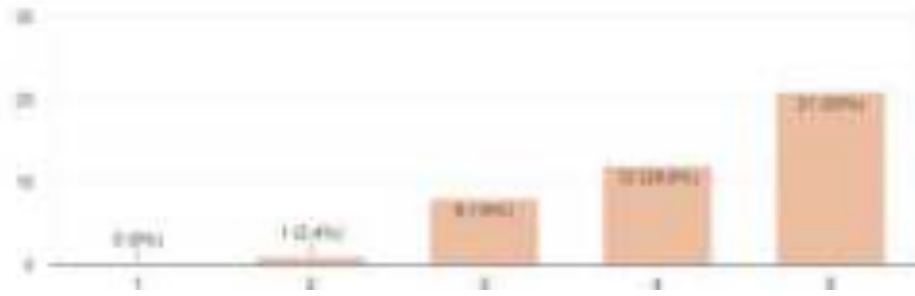


✓ Pelayanan Pelatihan



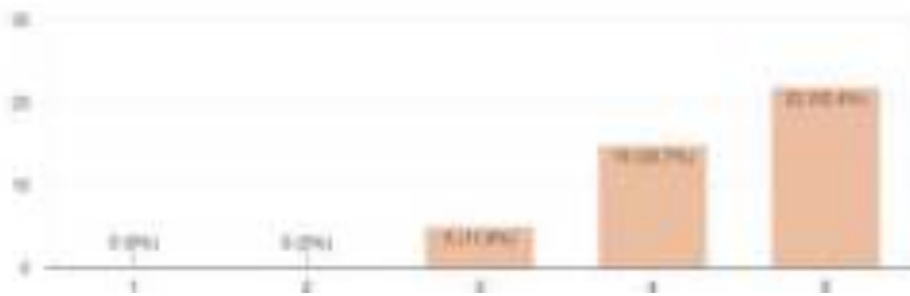
2. Variasi jenis snack /coffee-break yang disajikan

02 Tempat Kerja



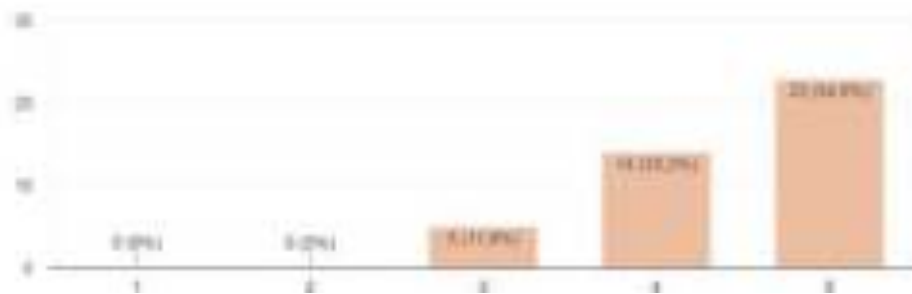
3. Kebersihan penyajian snack/coffee break

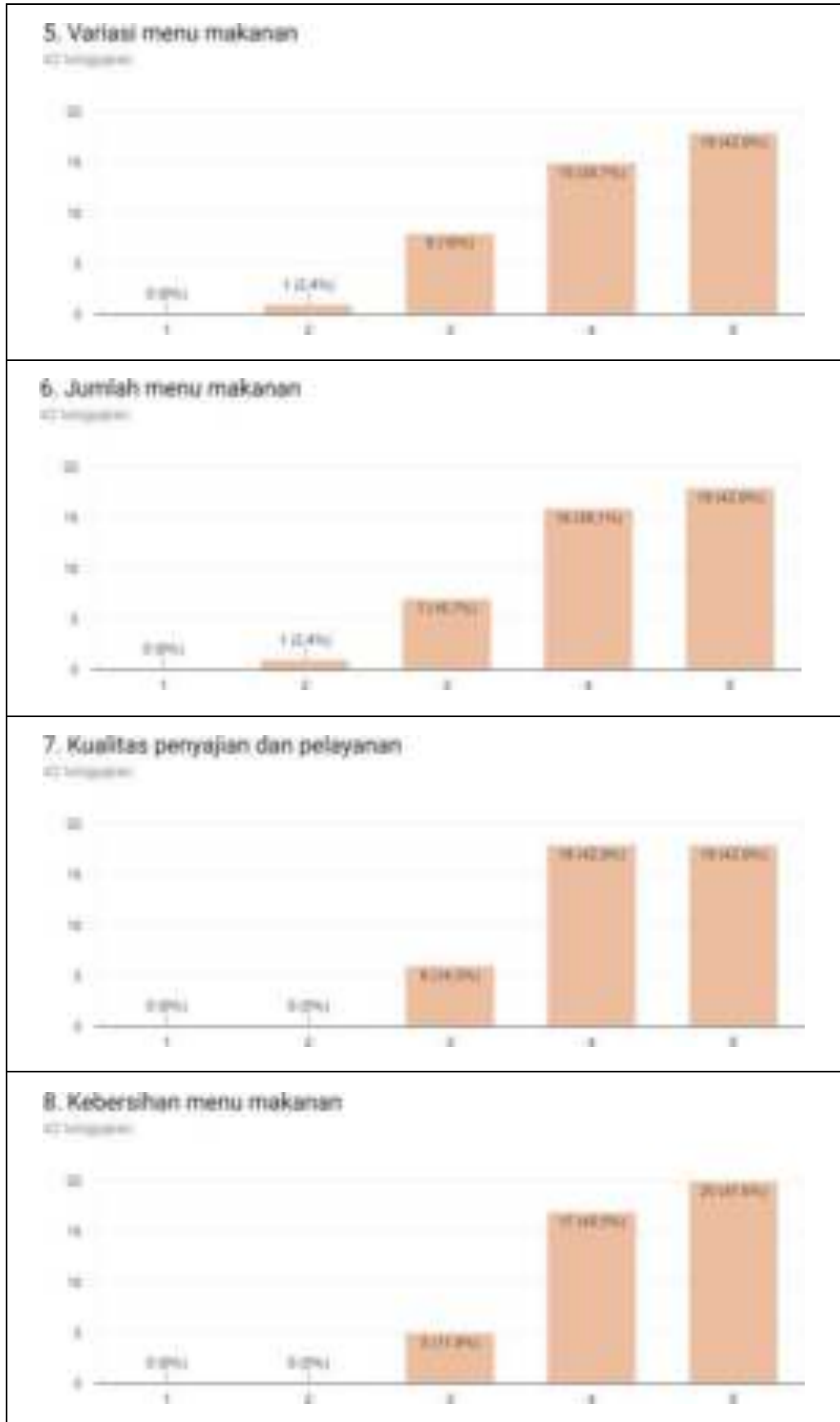
02 Tempat Kerja



4. Pengaturan waktu penyajian makanan

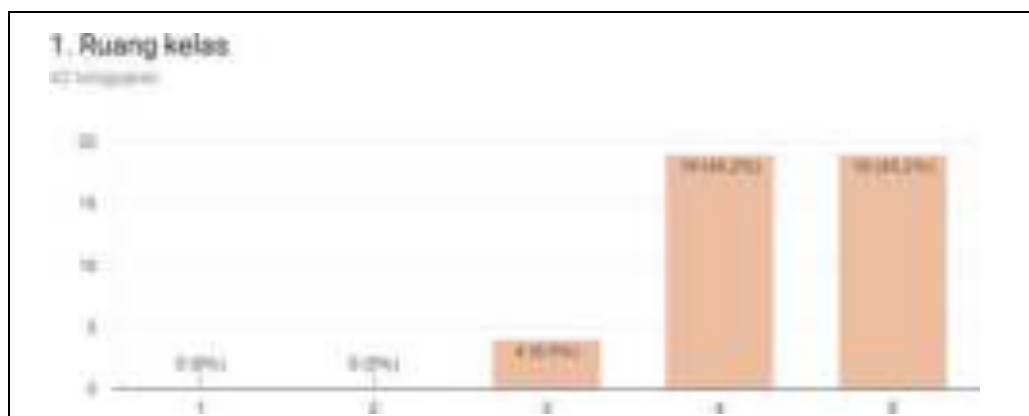
02 Tempat Kerja



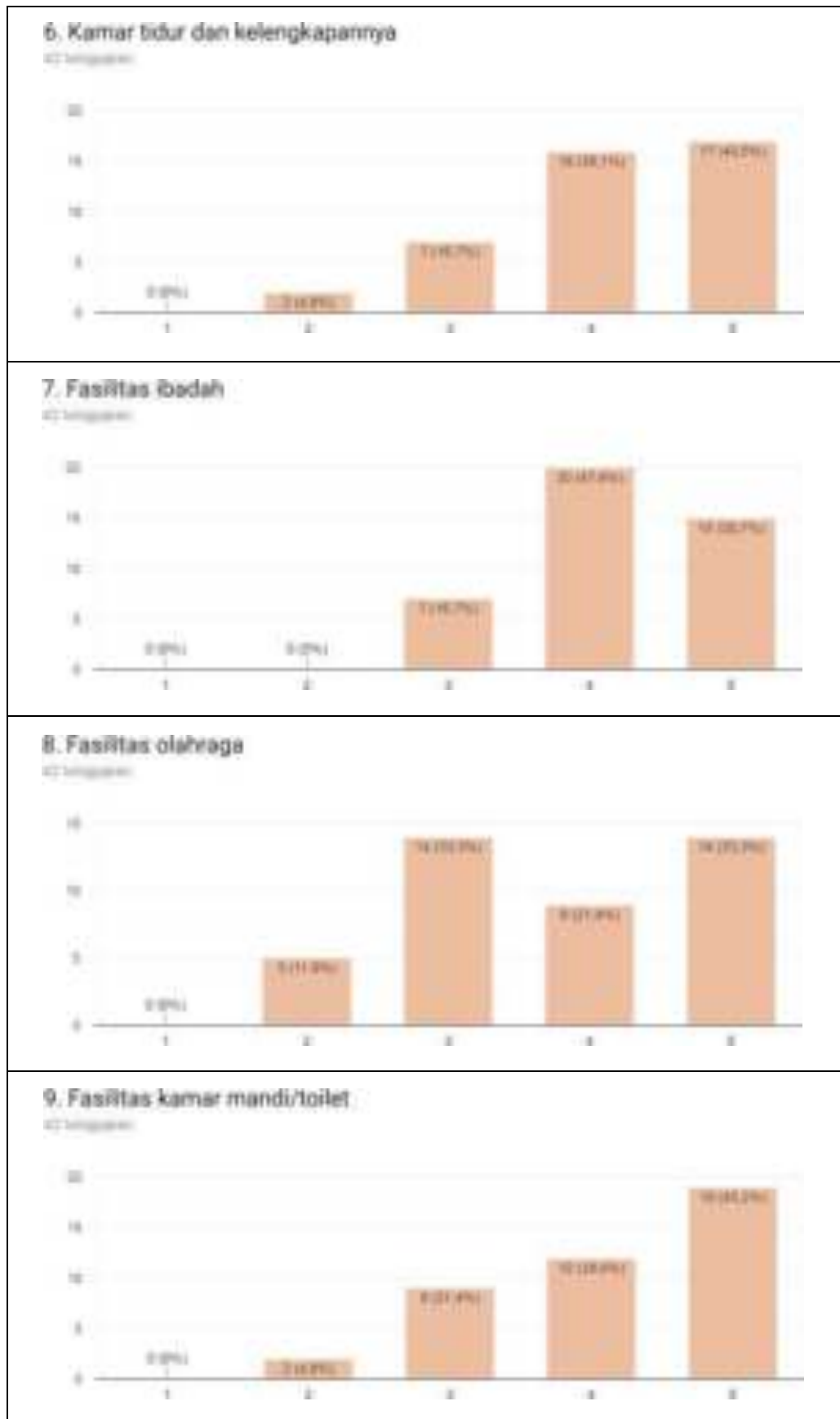




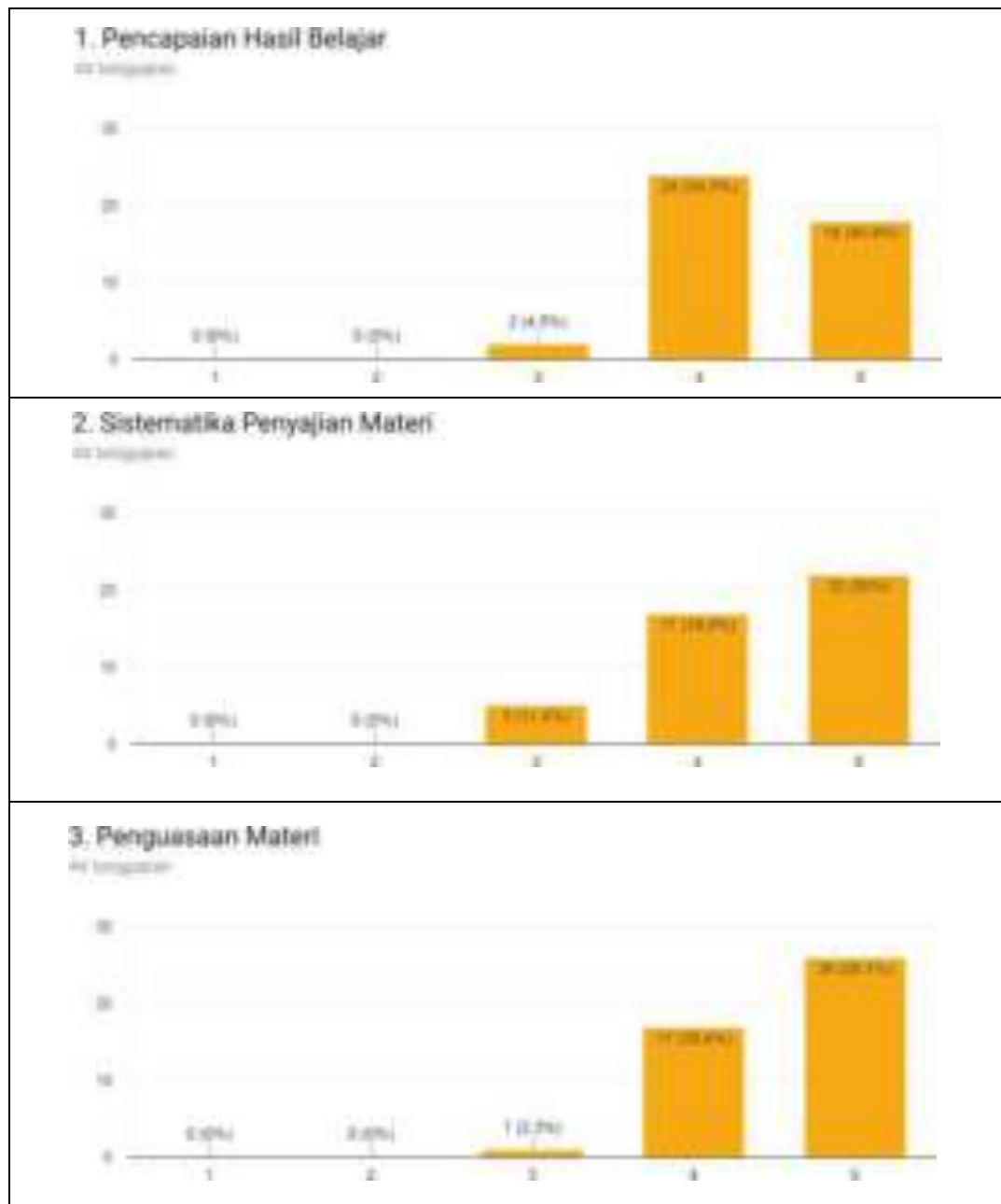
✓ Fasilitas Pelatihan

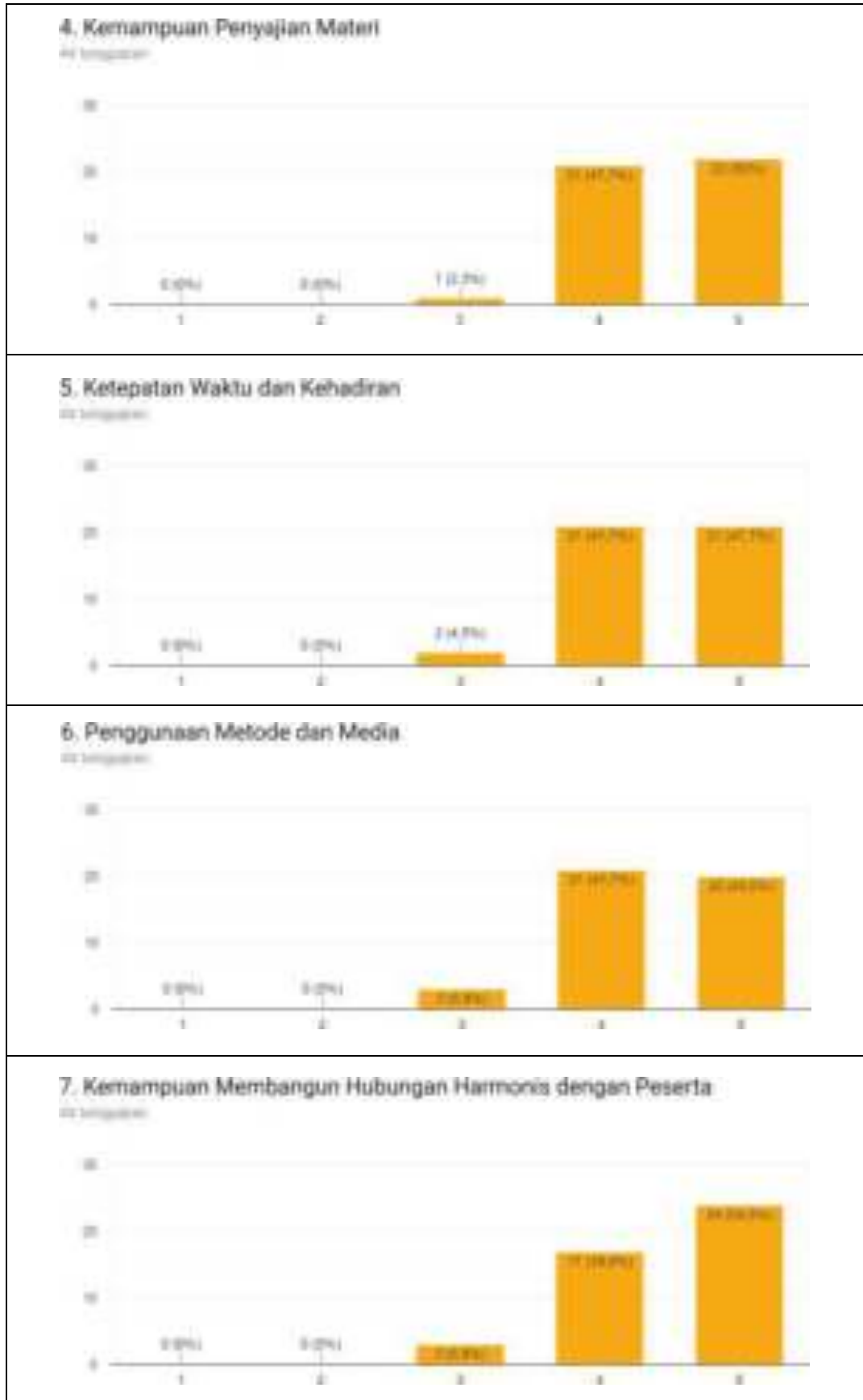


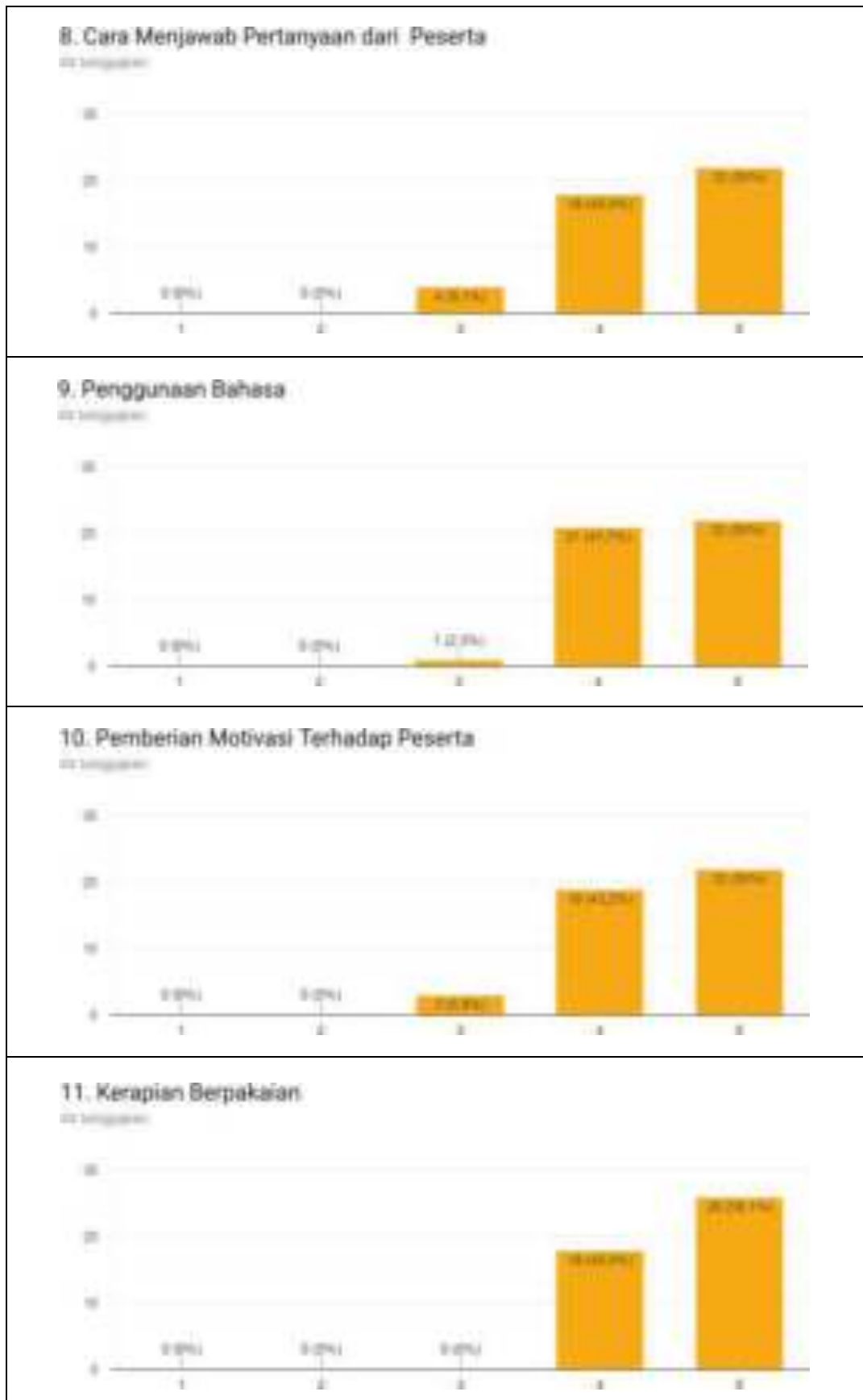




- ❖ Evaluasi terhadap Seluruh Pengajar Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat







1.2. ***Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Petugas Pengamanan Tingkat Dasar dengan Metode E-Learning TA 2020***

Dalam masa pandemi Covid-19, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tetap menyelenggarakan pelatihan bagi ASN Kemenkumham dengan mengalihkan metode pelaksanaan diklat dari klasikal menjadi e-learning sesuai arahan Kepala BPSDM Hukum dan HAM guna memutus rantai penyebaran virus. Sesuai instruksi tersebut, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan Pelatihan Teknis Pengamanan Dasar melalui metode e-learning sesuai kurikulum yang telah disusun oleh BPSDM Hukum dan HAM dengan tidak mengurangi esensi dan tujuan diadakannya pelatihan tersebut.

Pelatihan ini diselenggarakan selama 17 (tujuh belas) hari mulai tanggal 6 – 22 Mei 2020 dan diikuti oleh sejumlah 120 peserta dari 10 Kantor Wilayah di lingkungan Balai Diklat Jawa Tengah yang dibagi dalam 3 (tiga) angkatan. Peserta dibekali materi sebanyak 20 Jam Pelajaran (JP) dengan para Widyaiswara dari BPSDM Hukum dan HAM dengan metode pelatihan yang variatif seperti forum diskusi, *chatting*, tanya jawab, belajar mandiri, dan ujian *online/offline*.

Sebelum menyelenggarakan pelatihan, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BPSDM Hukum dan HAM sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.



Gambar Aplikasi E-Learning Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar

Para peserta akan menerima materi secara *online* dari para Pengajar/Widyaiswara. Selain itu, peserta juga akan mengimplementasikan *action plan* Teknik Pengamanan secara *offline* bersama Coach dan Mentor yang telah ditunjuk pada Unit Pelaksana Teknis masing-masing peserta dengan mendokumentasikannya dalam bentuk video berdurasi maksimal 5 (lima) menit. Selain keaktifan peserta, hasil aktualisasi serta penilaian dari coach dan mentor inilah yang menjadi syarat mutlak mengikuti ujian akhir.

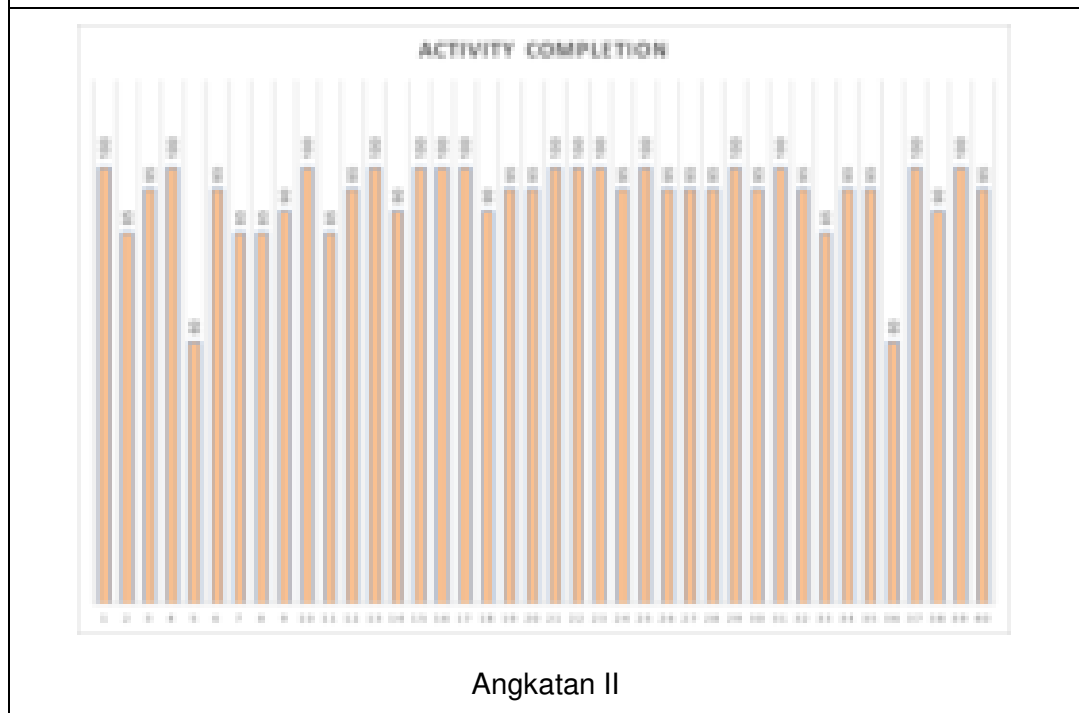
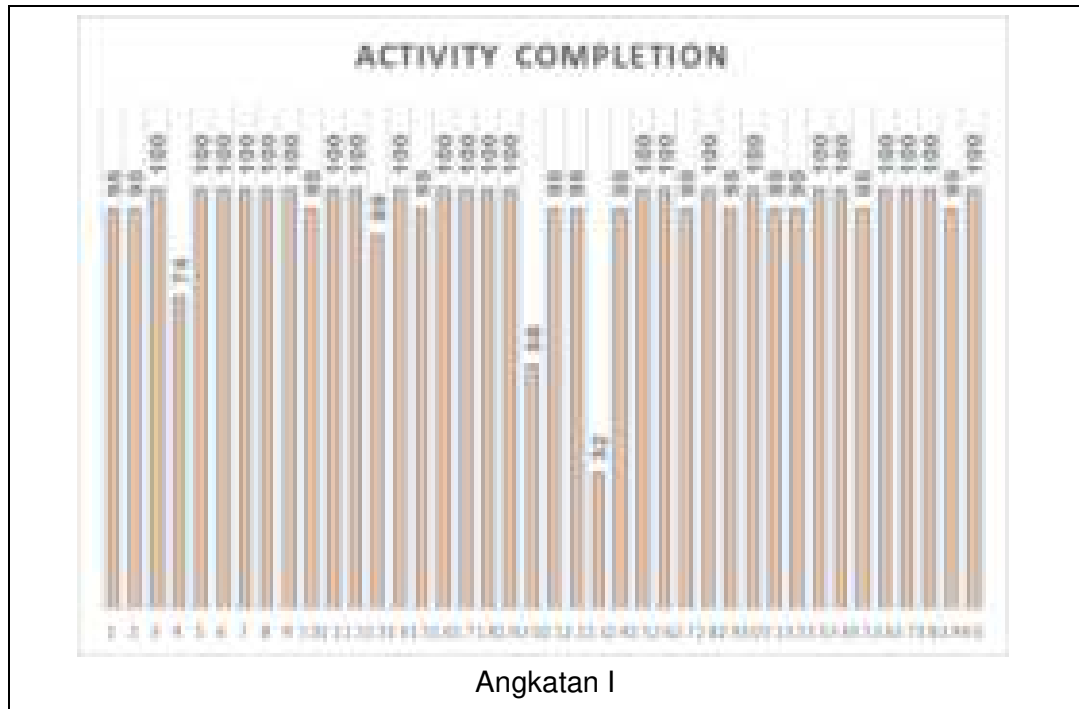


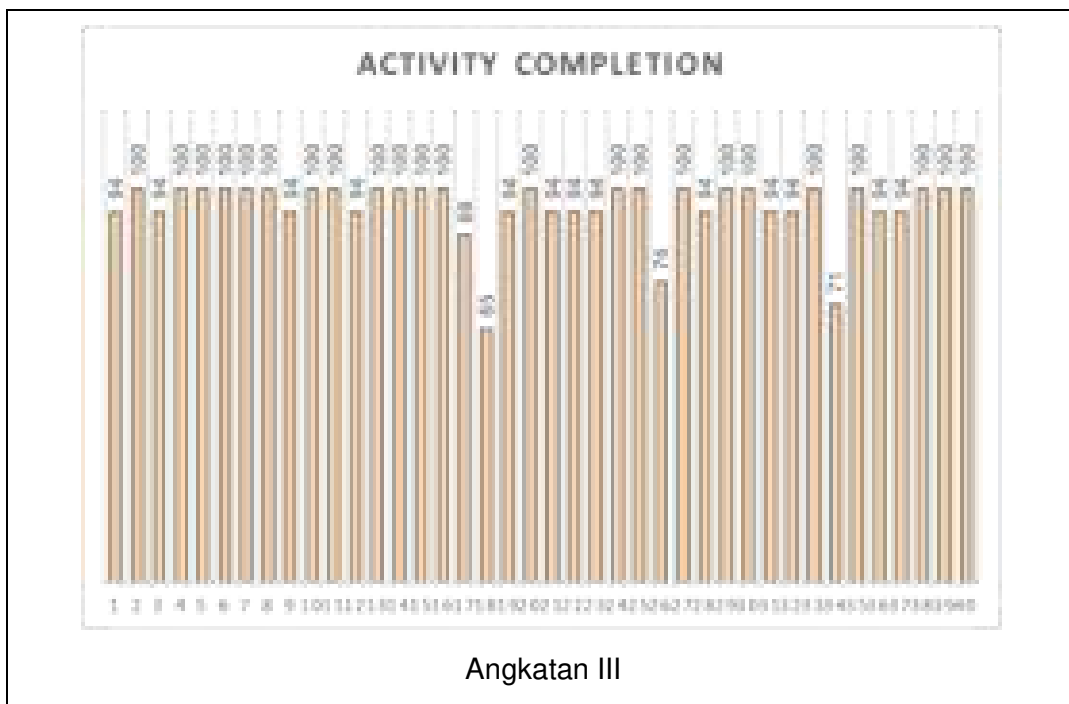
Hasil capaian Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Metode E-Learning :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	ANGGARAN	PENYERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis Pengamana Tingkat Dasar Metode E-Learning	6-22 Mei 2020	120 peserta	113 peserta	7 peserta	Rp 26.506.000	Rp 26.506.000

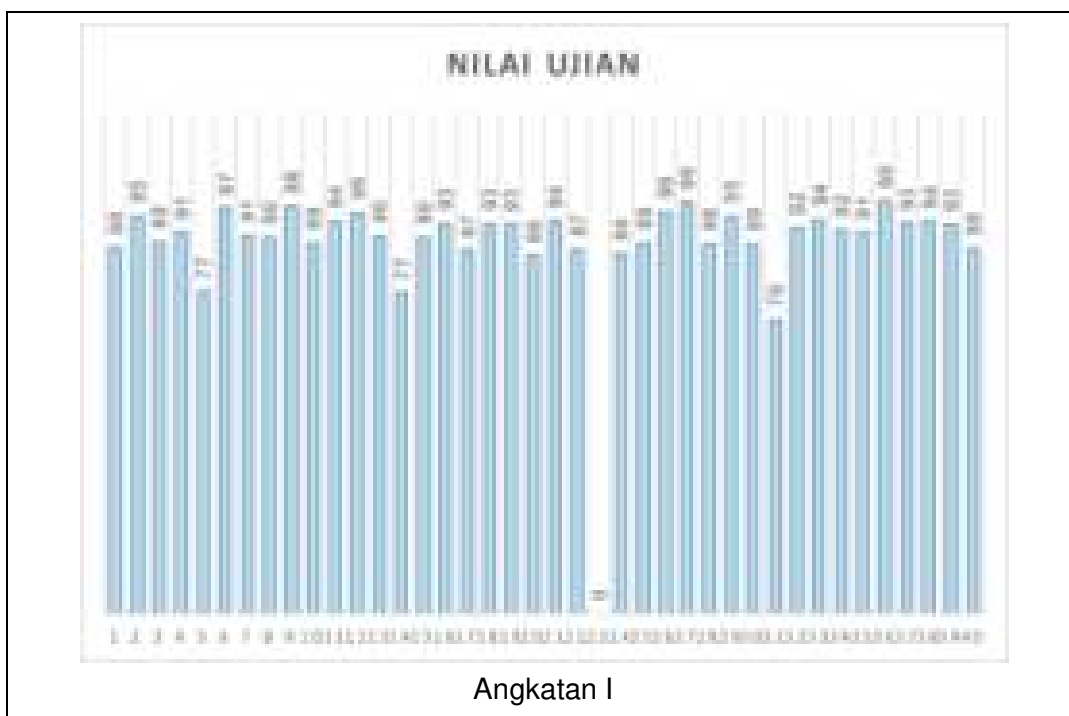
Hasil evaluasi Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Metode E-Learning :

✓ Nilai Partisipasi Keaktifan





✓ Nilai Ujian Peserta

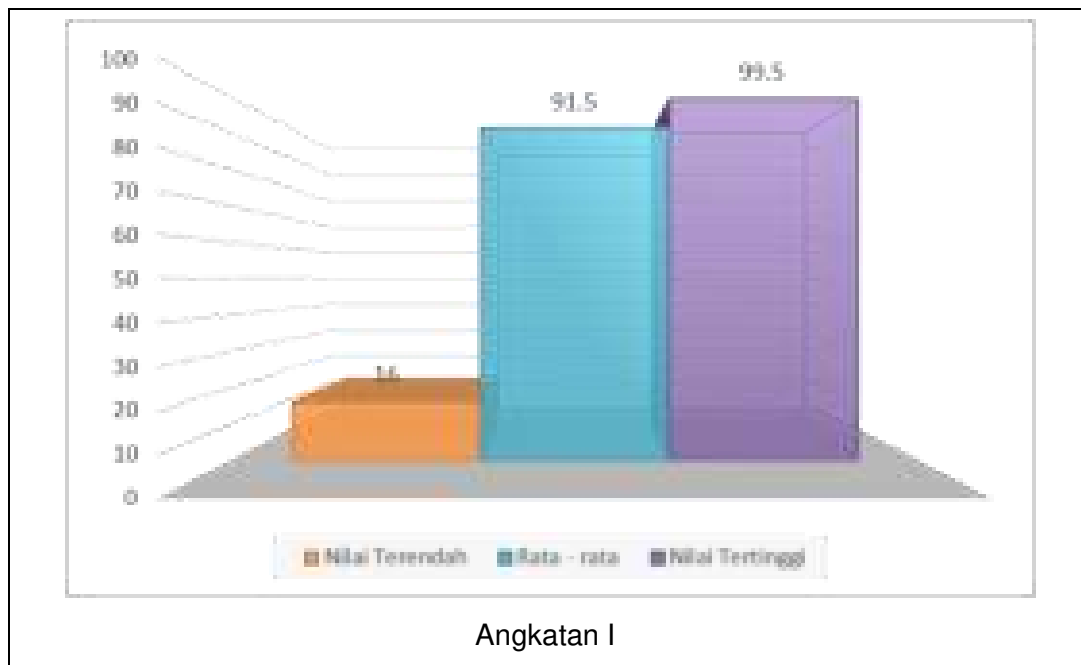




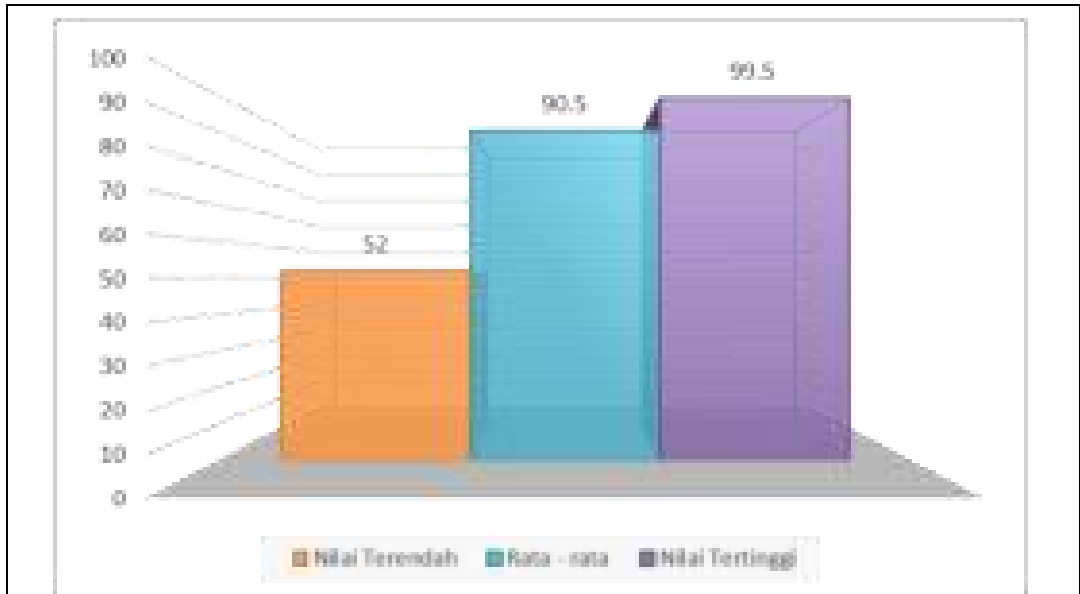
No	Nama	Jah	Instansi	Nilai	Nilai	Nilai	Nilai
1	100	99	99	100,00
2	100	99	99	100,00
3	100	99	99	100,00
4	100	99	99	100,00
5	100	99	99	100,00
6	100	99	99	100,00
7	100	99	99	100,00
8	100	99	99	100,00
9	100	99	99	100,00
10	100	99	99	100,00
11	100	99	99	100,00
12	100	99	99	100,00
13	100	99	99	100,00
14	100	99	99	100,00
15	100	99	99	100,00
16	100	99	99	100,00
17	100	99	99	100,00
18	100	99	99	100,00
19	100	99	99	100,00
20	100	99	99	100,00
21	100	99	99	100,00
22	100	99	99	100,00
23	100	99	99	100,00
24	100	99	99	100,00
25	100	99	99	100,00
26	100	99	99	100,00
27	100	99	99	100,00
28	100	99	99	100,00
29	100	99	99	100,00
30	100	99	99	100,00
31	100	99	99	100,00
32	100	99	99	100,00
33	100	99	99	100,00
34	100	99	99	100,00
35	100	99	99	100,00
36	100	99	99	100,00
37	100	99	99	100,00
38	100	99	99	100,00
39	100	99	99	100,00
40	100	99	99	100,00
41	100	99	99	100,00
42	100	99	99	100,00
43	100	99	99	100,00
44	100	99	99	100,00
45	100	99	99	100,00
46	100	99	99	100,00
47	100	99	99	100,00
48	100	99	99	100,00
49	100	99	99	100,00
50	100	99	99	100,00
51	100	99	99	100,00
52	100	99	99	100,00
53	100	99	99	100,00
54	100	99	99	100,00
55	100	99	99	100,00
56	100	99	99	100,00
57	100	99	99	100,00
58	100	99	99	100,00
59	100	99	99	100,00
60	100	99	99	100,00
61	100	99	99	100,00
62	100	99	99	100,00
63	100	99	99	100,00
64	100	99	99	100,00
65	100	99	99	100,00
66	100	99	99	100,00
67	100	99	99	100,00
68	100	99	99	100,00
69	100	99	99	100,00
70	100	99	99	100,00
71	100	99	99	100,00
72	100	99	99	100,00
73	100	99	99	100,00
74	100	99	99	100,00
75	100	99	99	100,00
76	100	99	99	100,00
77	100	99	99	100,00
78	100	99	99	100,00
79	100	99	99	100,00
80	100	99	99	100,00
81	100	99	99	100,00
82	100	99	99	100,00
83	100	99	99	100,00
84	100	99	99	100,00
85	100	99	99	100,00
86	100	99	99	100,00
87	100	99	99	100,00
88	100	99	99	100,00
89	100	99	99	100,00
90	100	99	99	100,00
91	100	99	99	100,00
92	100	99	99	100,00
93	100	99	99	100,00
94	100	99	99	100,00
95	100	99	99	100,00
96	100	99	99	100,00
97	100	99	99	100,00
98	100	99	99	100,00
99	100	99	99	100,00
100	100	99	99	100,00

Angkatan III

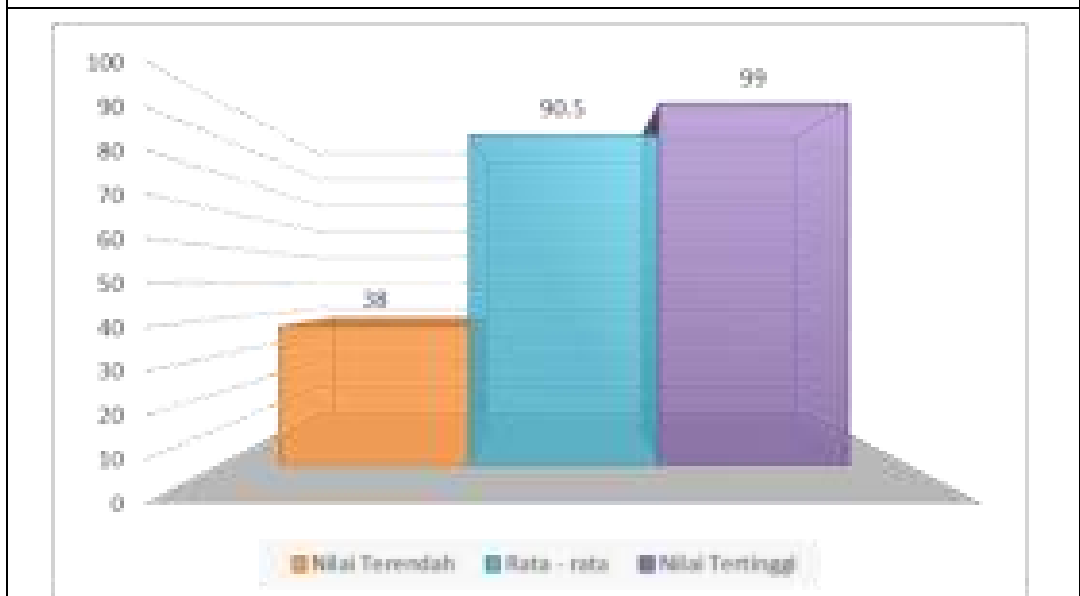
✓ Evaluasi Nilai



Angkatan I



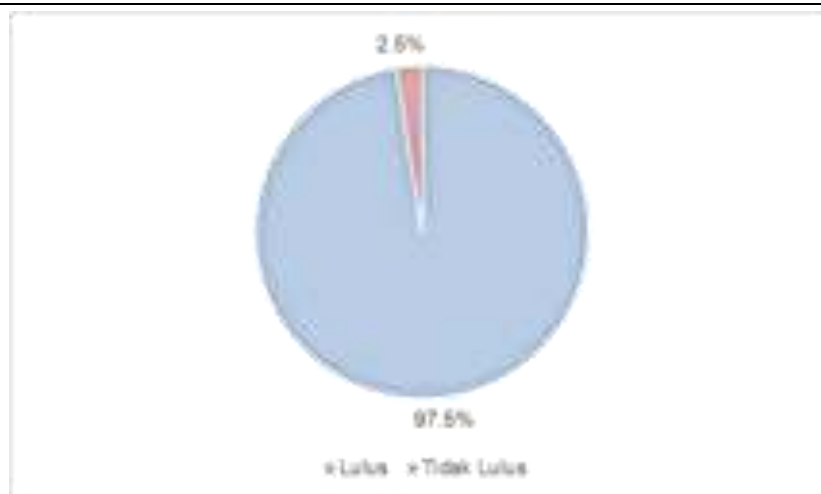
Angkatan II



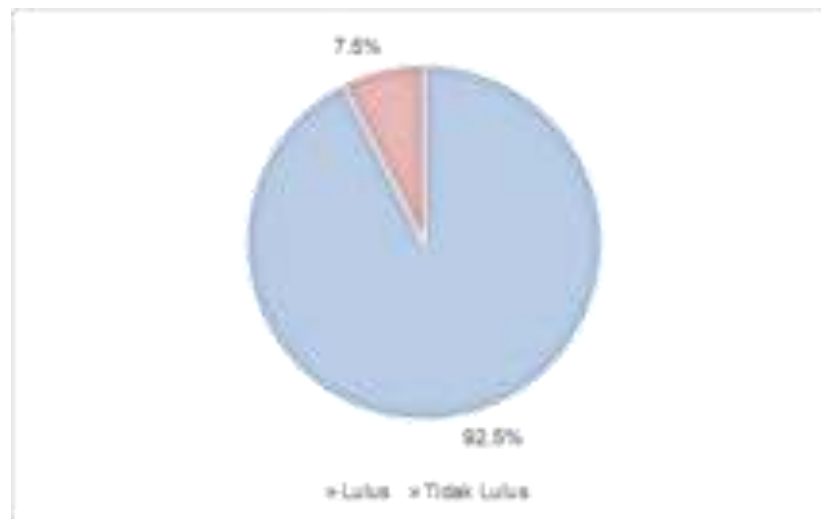
Angkatan III



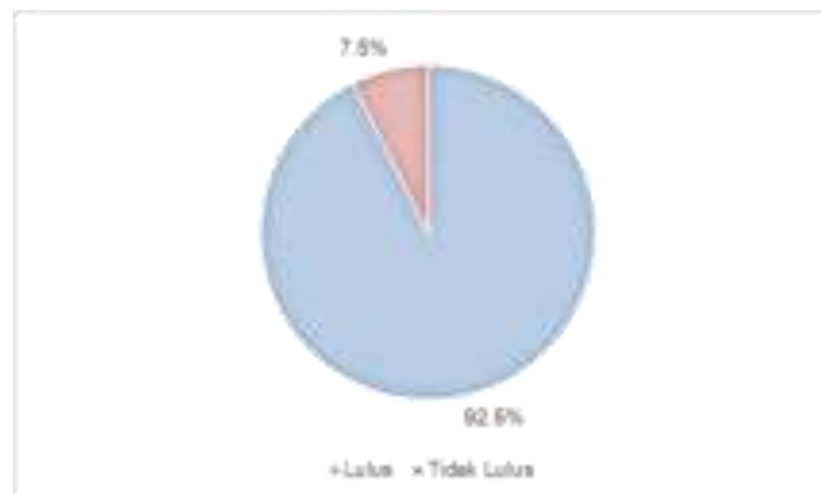
✓ Persentase Kelulusan



Angkatan I



Angkatan II



Angkatan III



Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar dengan metode *e-Learning* Angkatan I, II dan III ada total 7 (angkatan I : 1 orang, angkatan II : 3 orang, angkatan III : 3 orang) dari 120 peserta atau sekitar 5,8% yang gagal untuk mencapai standart nilai kelulusan yang telah ditetapkan, baik dari aspek nilai keaktifan partisipasi maupun dari hasil nilai ujian yang diraih peserta pelatihan tersebut. Dari dua aspek penilaian, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya peserta mencapai nilai kelulusan pelatihan kali ini, berikut adalah faktor- faktor yang dapat kami analisa melalui komunikasi secara online pada grup Whatsapp yang telah dibentuk selama pelatihan berlangsung, diantaranya :

1. Tidak memenuhi Prosentase Keaktifan

Peserta tidak mengikuti rangkaian sesi yang diselenggarakan oleh para pengampu materi / Widyaiswara, dalam hal ini, terdapat satu peserta yang tidak mampu memenuhi standard kelulusan *activity completion*.

2. Tidak memenuhi Nilai Ujian

a. Tidak upload materi aktualisasi

Salah satu syarat terpenuhinya penilaian kelulusan adalah upload materi aktualisasi, selama tenggang waktu yang telah ditentukan dan diberikan, beberapa peserta tidak berhasil mengupload hasil aktualisasinya dengan permasalahan intinya adalah para coach / mentor belum memberikan angka penilaian yang dibutuhkan peserta sebagai bahan kelulusan.

b. Tidak mengikuti Post Test

Beberapa peserta tidak bisa mengikuti sesi post test karena faktor jaringan internet yang tidak stabil, terutama yang bertugas di Pulau Nusakambangan, sehingga menghambat dalam proses pembelajaran atau ujian post test. Hal ini sangat mempengaruhi bobot penilaian dalam kelulusan peserta.

1.3. **Pelatihan Teknis Pemasyarakatan Pengamanan Tingkat Lanjutan TA 2020**

Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan dilakukan melalui metode e-learning sesuai kurikulum yang telah disusun oleh BSPDM Hukum dan HAM. Kegiatan ini diselenggarakan selama 21 hari terhitung tanggal 19 Juni – 9 Juli 2020 yang diikuti oleh 113 peserta yang sebelumnya telah dinyatakan lulus Pelatihan Teknis Pengamanan



Tingkat Dasar dan terbagi dalam 2 (dua). Tak hanya penyampaian materi dan diskusi secara *online* dengan pengajar/Widyaiswara melalui aplikasi e-learning BSPDM Hukum dan HAM, peserta juga akan melakukan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang dipandu oleh Coach dan Mentor serta penyusunan laporan akhir berupa karya tulis atas praktik sesuai materi yang telah diberikan. Sebagai pendukung laporan, peserta akan membuat cuplikan video peragaan. Praktik Kerja Lapangan dilakukan di Unit Pelaksana Teknis masing-masing peserta.

Sebelum mengakhiri rangkaian kegiatan diklat, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PKL pada beberapa Unit Pelaksana Teknis di wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta sebagai bentuk pengawasan dan bah an evaluasi dalam laporan penyelenggaraan pelatihan. Peserta didampingi dan dinilai langsung oleh Mentor yang telah ditunjuk pada Unit Pelaksana Teknis masing-masing. Di sini peserta dituntut untuk dapat menyelesaikan praktik, menyusun laporan PKL, dan mempresentasikan laporan tersebut di hadapan coach dan mentor.



*Bahan ajar dan diskusi pada aplikasi E-Learning
BPSDM Hukum dan HAM*



Pembelajaran dan pemberian materi diklat



Monev PKL Praktik Pemakaian dan Perawatan Senjata



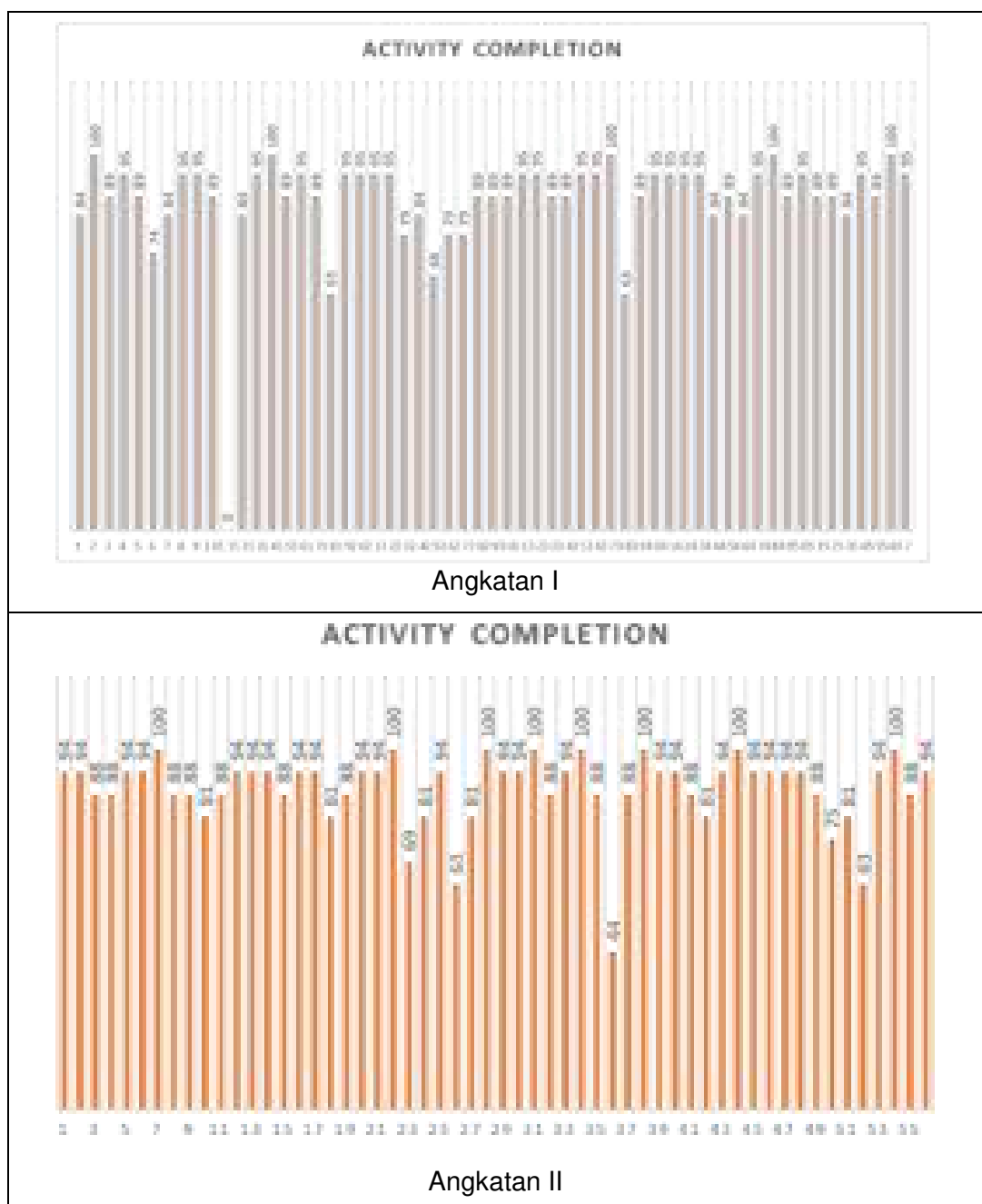
Rapat prosedur dan evaluasi Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan Metode e-learning

Hasil capaian Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan Metode E-Learning :

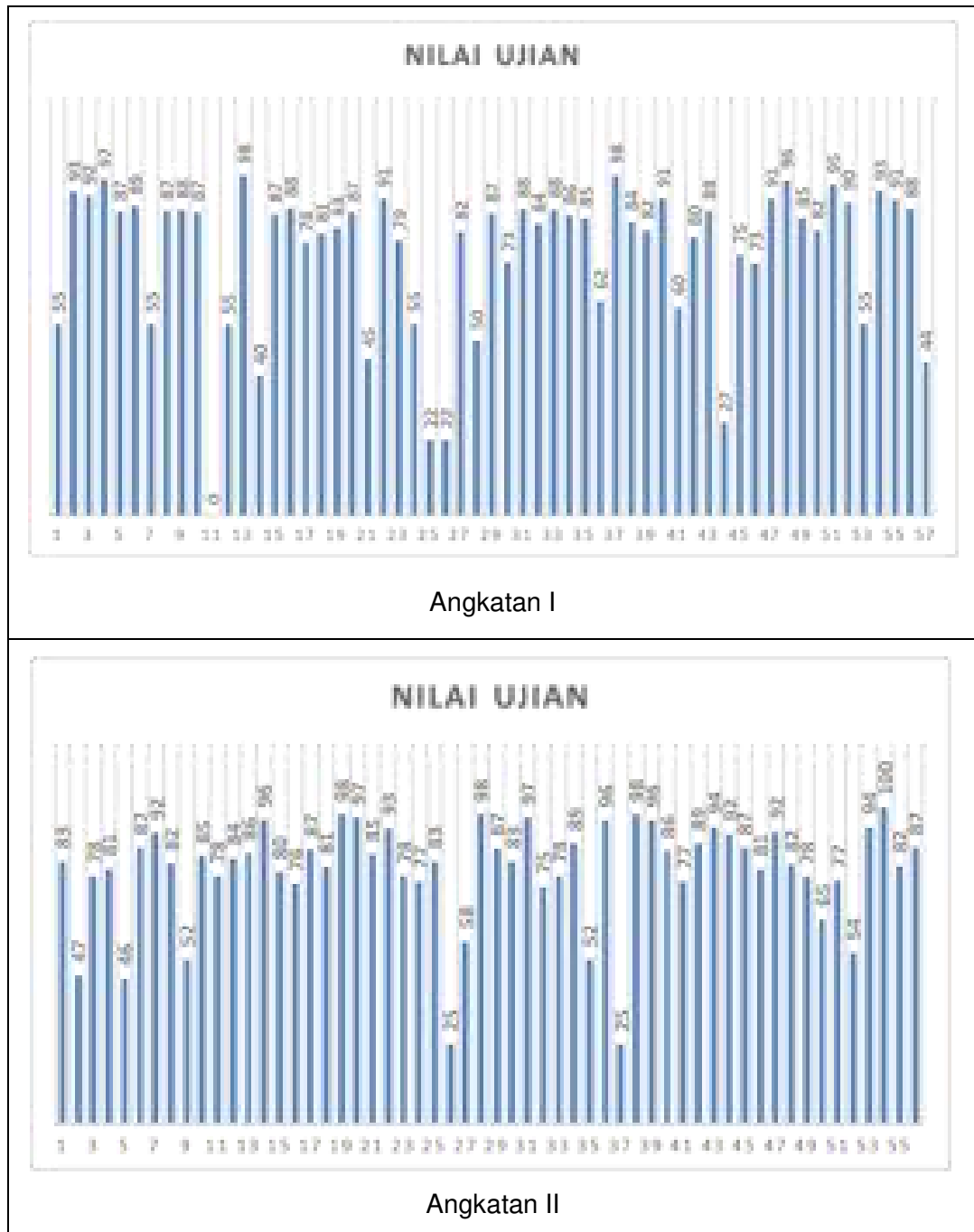
N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	ANGGARAN	PENYERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar Metode E-Learning	19 Juni – 9 Juli 2020	113 peserta	106 peserta	7 orang	Rp 45.489.000	Rp 45.488.760

Hasil evaluasi Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan Metode E-Learning :

✓ Nilai Partisipasi Keaktifan



✓ Nilai Ujian Peserta





✓ Hasil Kelulusan Peserta

Angkatan I

No	Nama	NIP	Satker	Activity Completion	Nilai	Total Nilai	Ket
1	DWI PRASETIYO	199510122017121004	LAPAS KELAS IIA MAGELANG	100	98	99	LULUS
2	ANJAR PRAMUDITA MIRA DEWI	199712272017122001	RUTAN KELAS IIB WONOGIRI	100	96	98	LULUS
3	SUHARFIANTO	198910112017121002	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA MADIUN	100	93	96	LULUS
4	SAIFULLAH	199104252014021003	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	95	98	96	LULUS
5	ARDIYANTO SETIAWAN	198911212017121001	LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN	95	97	96	LULUS
6	RENDI BAYU MEISANDI	199905252017121003	RUTAN KELAS IIB TRENGGALEK	95	93	94	LULUS
7	ANANTO RAHMAWAN PUTRO	199506102017121003	LPKA KELAS I KUTOARJO	100	88	94	LULUS
8	FERDINANDUS DEWA	199711282017121001	LAPAS KELAS IIB ENDE	95	91	93	LULUS
9	MOCHAMMAD CAESAR ROFDY	199606012017121006	LAPAS KELAS IIA BANYUWANGI	95	91	93	LULUS
10	OERIP BUDIYANTO	199207122017121005	LAPAS KELAS IIA JEMBER	95	91	93	LULUS
11	ARIZAL NURWAHYU RAMADHAN	199812262017121002	LAPAS KELAS I SURABAYA	89	95	92	LULUS
12	ALVIAN MUCHTYA SANTOSO	199107062017121008	LAPAS KELAS IIA AMBARAWA	95	88	92	LULUS
13	MUHAMMAD RIZKA NUZULUL ROHMI	199312092017121003	LPKA KELAS II YOGYAKARTA	95	88	92	LULUS
14	PURNOMO	199012112017121005	LAPAS KELAS I SEMARANG	95	88	91	LULUS
15	IDA OVILIANI	199704192017122002	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA	95	88	91	LULUS
16	I WAYAN ASTHIRA PUTRA	199012052017121002	LAPAS KELAS IIB SINGARAJA	95	87	91	LULUS
17	AYOM KUSUMO WINAHYU	199201152017121001	LAPAS TERBUKA KELAS IIB KENDAL	95	87	91	LULUS
18	HIZKIA NAFTALI	198911072017121002	LAPAS KELAS IIB PATI	89	92	90	LULUS
19	NANANG TRI CAHYONO	199412022017121002	LAPAS KELAS I MALANG	95	85	90	LULUS
20	ARINDA RIDWANI PUTRI ASY'ARI	199906232017122004	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA PALANGKARAYA	89	91	90	LULUS
21	ADAM DIMAS HERLAMBANG	199905032019011003	RUTAN KELAS IIB WATES	89	90	90	LULUS
22	HASAN ASY'ARI	199402262017121006	LAPAS KELAS IIA KENDAL	95	84	89	LULUS
23	NARKO	199111122017121003	LAPAS KELAS IIA PURWOKERTO	95	83	89	LULUS
24	AKBAR ALI PRATAMA	199404282017121002	RUTAN KELAS IIB KEBUMEN	89	88	88	LULUS
25	REFAN TAUFIK	199809082017121001	RUTAN KELAS IIB WONOSARI	95	82	88	LULUS
26	WINDA GLORIA KRISTANTI APRILLIANA	199004012017122002	RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA	89	87	88	LULUS
27	GIYARTA	199012212017121003	RUTAN KELAS IIB BOYOLALI	89	87	88	LULUS
28	SINGGIH WAHYU NUGROHO	199307142017121009	LAPAS KELAS IIA BESI	89	87	88	LULUS
29	CAHYA KUNCORO	199105192017121007	LAPAS KELAS IIB CILACAP	89	87	88	LULUS
30	CITA RIMBAWATI	199411012017122003	LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN	89	86	88	LULUS
31	FITRI AULYA	199702132017122002	LAPAS WANITA KELAS IIA MALANG	95	80	87	LULUS
32	RACHMAT ADIL PANGESTU	199806212017121006	RUTAN KELAS IIB PURBALINGGA	89	85	87	LULUS
33	DEDY NISJAMAN ZILIWU	199605102017121004	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	89	82	85	LULUS
34	ABID FATHONI	199107312017121005	LAPAS KELAS IIB KLATEN	89	78	84	LULUS
35	HADI PRABOWO	199706122017121003	LPKA KELAS I BLITAR	89	75	82	LULUS
36	BAGUS ANSHORI	199008022010121001	LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG	74	89	81	LULUS
37	DW. GD. DIADMA DANAHARTA	199312032017121002	LPKA KELAS II KARANGASEM	89	73	81	LULUS
38	AFRI SASONGKO ADY PUTRA	199304282017121002	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	79	82	80	LULUS
39	EDI SUSANTO	199207172017121004	LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN	79	79	79	LULUS
40	INTAN PUJI RIYANTI	199503032017122001	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG	95	62	78	LULUS



41	BIMO PRASETYO	199709122017121002	LAPAS KELAS IIB SLEMAN	84	73	78	LULUS
42	PREGAS GALANG BIMA WICAKSANA	199611212017121004	LAPAS KELAS I MADIUN	95	60	77	LULUS
43	DIPTA ZAZA DIANDARU	199511072017121001	RUTAN KELAS IIB WONOSOBO	63	84	74	LULUS
44	AGAM KRISNA SETIAJI	199109262017121002	LAPAS KELAS IIB BREBES	63	81	72	LULUS
45	SYAMSUL MUARIFIN	199105082017121003	LAPAS KELAS IIA SIDOARJO	100	40	70	LULUS
46	EKA HADI PRAYUGO	199201292017121006	LAPAS KELAS IIB BONDOWOSO	95	45	70	LULUS
47	HELMY YUSLADA	199006292017121006	RUTAN KELAS IIB KUDUS	95	44	70	LULUS
48	MUHAMMAD ICHSAN FADLYANOR	199208222017121003	LPKA KELAS II SAMARINDA	84	55	70	LULUS
49	TRI WULAN PURNAMI	198908222017122001	LAPAS PEREMPUAN KELAS IIA SAMARINDA	84	55	70	LULUS
50	AGUS MULYADI PAMUNGKAS	1990080'92017121003	RUTAN KELAS IIB PEMALANG	84	55	70	LULUS
51	SOKIF MARDIYANSAH	199103052009121003	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	84	55	70	LULUS
52	AL-GHAZALI	199905242017121001	RUTAN KELAS IIB KUPANG	84	55	70	LULUS
53	CATUR SINGGIH PAMUNGKAS	199305242017121003	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA NUSA KAMBANGAN	89	50	70	LULUS
54	FAISAL ARIF PRAMUDITYA	199705052017121002	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA PAMEKASAN	84	27	55	TIDAK LULUS
55	ANGGI DWI LAKSONO	199303302017121002	RUTAN KELAS IIA PEKALONGAN	79	22	50	TIDAK LULUS
56	LALU ERWAN RAHADI	199212212012111001	RUTAN KELAS IIB SELONG	68	22	45	TIDAK LULUS
57	RENGGAR EKA BUDIANTO	199101232017121003	LAPAS KELAS IIA PAMEKASAN	0	0	0	TIDAK LULUS

Angkatan II

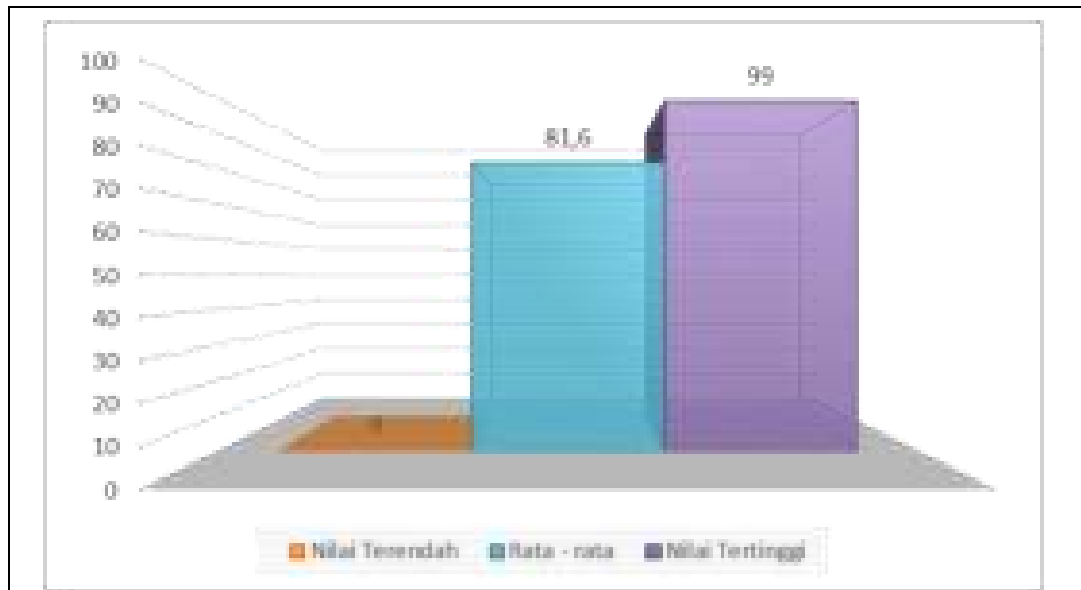
No	Nama	NIP	Satker	Activity Completion	Nilai	Total Nilai	Ket
1	DANANG DWI ARIFAI	200007192019011001	RUTAN KELAS IIB WATES	100	100	100	LULUS
2	FREDI YUDHA PRATAMA	199502132017121003	LAPAS KELAS IIB MOJOKERTO	100	98	99	LULUS
3	YOPPY SEPTIAN EFENDI	199609202017121002	LAPAS KELAS IIB LAMONGAN	100	98	99	LULUS
4	AHMADI SHOLEH	199507062017121003	RUTAN KELAS IIB BANTUL	100	97	98	LULUS
5	MOHAMMAD FIRDAUS	199208012017121005	LAPAS KELAS I MADIUN	100	93	97	LULUS
6	SAIFULLAH BAHARUDIN	198909242017121003	LAPAS KELAS IIB PASURUAN	100	92	96	LULUS
7	ADI JAYA PUTRA	199809072017121004	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	100	92	96	LULUS
8	PANDU RAHMANI HAK	199203032017121009	RUTAN KELAS IIB JEPARA	94	97	95	LULUS
9	SLAMET RIYANTO	199012112017121003	LAPAS KELAS IIB SLAWI	94	96	95	LULUS
10	SUHARDI YANTO	199612142017121004	LAPAS KELAS IIA MAGELANG	94	96	95	LULUS
11	REDA ARDIANSYAH	199604252017121006	LAPAS KELAS IIB BLITAR	100	89	94	LULUS
12	ALI AKBAR FILAYATI	199804142017121008	LAPAS KELAS IIB PASURUAN	94	94	94	LULUS
13	HANDA ROESTANTO ADI	200001102019011001	CABRUT SUMENEP DI ARJASA	94	94	94	LULUS
14	DHEMA OKTAKIRANA	199810312017122003	RUTAN PEREMPUAN KELAS IIA SURABAYA	94	92	93	LULUS
15	OKKY ALEXANDER FEBRIANTO	199202282017121004	RUTAN KELAS I SURABAYA	88	98	93	LULUS
16	TEGAR SEPTRI NUR SIDIK	199809122017121002	RUTAN KELAS IIB BANJARNEGARA	94	87	91	LULUS
17	DIYAN TEGUH SETIAWAN	198909242017121002	LAPAS KELAS IIB TEGAL	94	87	90	LULUS
18	RESTU SETYAWAN	199202272017121005	LP KELAS IIA PASIR PUTIH NUSAKAMBANGAN	94	87	90	LULUS
19	TIMAURA FAJAR PERDANA	199504272017121002	RUTAN KELAS IIB SALATIGA	94	87	90	LULUS
20	DIAS RENDRA SOFYANTO	199105252017121003	KANWIL JAWA TENGAH	94	87	90	LULUS
21	AYUNK CHADEMAS TATA	199703262017121004	RUTAN KELAS IIB BANYUMAS	94	86	90	LULUS
22	DANANG SETIAWAN	199009242017121004	RUTAN KELAS IIB BLORA	94	86	90	LULUS



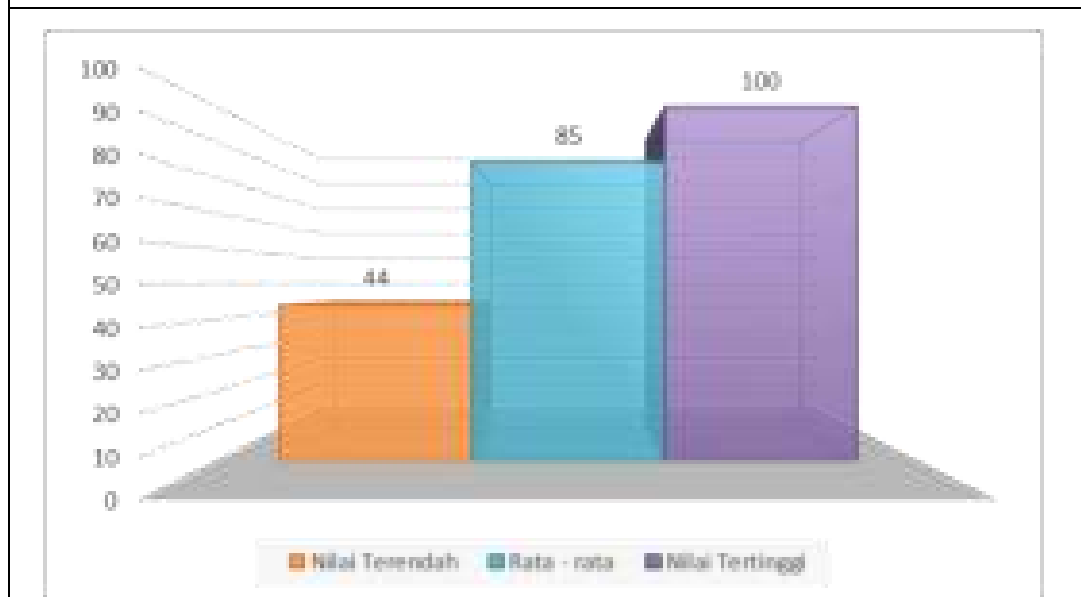
23	BAMBANG SUTRISNO	199203032017121010	KANWIL JAWA TENGAH	94	85	90	LULUS
24	ANDIKA SETYANUGROHO	199009112017121001	LAPAS KELAS IIA PEKALONGAN	94	84	89	LULUS
26	ALEK SETIAWAN	199505052017121010	LAPAS KELAS IIB TUBAN	94	83	88	LULUS
25	BIMO ESTU AJI	199405252017121001	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	94	83	88	LULUS
27	DENY NUR ROMADHON	199812272017121003	LAPAS KELAS IIA KEDIRI	94	83	88	LULUS
28	FENDI NUR AL IKHSAN	199902032017121002	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	94	82	88	LULUS
29	SATRIA DWI PUTERA	199810312017121002	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA KARANG INTAN	94	81	87	LULUS
30	FEBIANTO HARNAMAS BOWO	199602112017121003	RUTAN KELAS IIB SUMENEP	94	78	86	LULUS
31	MUHAMMAD RIDHO HIMAWAN	199803302017121002	RUTAN KELAS IIA YOGYAKARTA	81	89	85	LULUS
32	ESTU PRABOWO	198912172017121003	LAPAS KELAS I BATU	88	82	85	LULUS
33	GHANDI HUODOYO	199105212017121004	RUTAN KELAS IIB TEMANGGUNG	94	76	85	LULUS
34	CHARLOS MERU BENI	199109192017121004	LAPAS KELAS II SUKAMARA	88	82	85	LULUS
35	I GUSTI NGURAH AGUNG HADI WIBAWA S	198509152010121002	RUTAN KELAS IIB KLUNGKUNG	88	81	84	LULUS
36	MAS` UD	199103242017121003	LAPAS KELAS IIB LUMAJANG	88	80	84	LULUS
37	SAMSUL HADI	198502192012121001	LAPAS TERBUKA KELAS IIB MATARAM	88	78	83	LULUS
38	LUQMAN SETYAWAN ANDHIKA K	199006182017121003	LAPAS KELAS I MALANG	81	85	83	LULUS
39	ZULIS ELBY PRADANA	199007282017121003	LAPAS KELAS I SEMARANG	88	78	83	LULUS
40	ZEGAH FAUZAN DEWANDARU	199903082017121002	RUTAN KELAS I SURAKARTA	88	78	83	LULUS
41	GALIH LESMANA	199710252017121004	LAPAS KELAS IIA YOGYAKARTA	88	77	82	LULUS
42	DENY PRADITA TRI HANDARU	199108302017121008	RUTAN KELAS IIB WONOSARI	81	81	81	LULUS
43	MUHAMMAD NOOR	199511112017121002	LAPAS KELAS III BANJARBARU	88	75	81	LULUS
44	DICKY PATRIA WIJAYA	199906192017121004	LAPAS KELAS IIA PURWOKERTO	81	77	79	LULUS
45	AKHMAD ABDURRAKHMAN	199312262017121001	RUTAN KELAS IIB PURWOREJO	81	77	79	LULUS
46	ANGGA ADITYA	199208142017121005	RUTAN KELAS IIB REMBANG	69	78	73	LULUS
50	RISWANTO	197903142007031001	LAPAS NARKOTIKA KELAS IIA YOGYAKARTA	94	47	70	LULUS
54	ANANDA AINA RAHMA	199903212017122001	LAPAS KELAS I BATU	75	65	70	LULUS
53	NUR AISYAH	199607282017122002	KANWIL D.I. YOGYAKARTA	44	96	70	LULUS
48	SANDI ROSADY	198604212007031001	LAPAS KELAS IIB TENGGARONG	94	46	70	LULUS
51	HILDA APRILITA PRATIWI	199604282017122002	LAPAS PEREMPUAN KELAS II PONTIANAK	88	52	70	LULUS
55	JOKO SETYONO	199005242017121002	RUTAN KELAS IIB PURWODADI	88	52	70	LULUS
52	SYAHRUN	199412122017121003	LAPAS KELAS IIB SINGKAWANG	81	58	70	LULUS
47	VIAN DIGI PRATAMA	199907092017121002	LAPAS KELAS IIA SRAGEN	63	54	58	TIDAK LULUS
49	TRIAN TO YOGA PRADANA	199608242019011001	CABRUT SUMENEP DI ARJASA	88	25	56	TIDAK LULUS
56	MARRIO YERMI STEVAN ADOE	199411052017121001	LAPAS ANAK KELAS IIA KUPANG	63	25	44	TIDAK LULUS



✓ Evaluasi Nilai

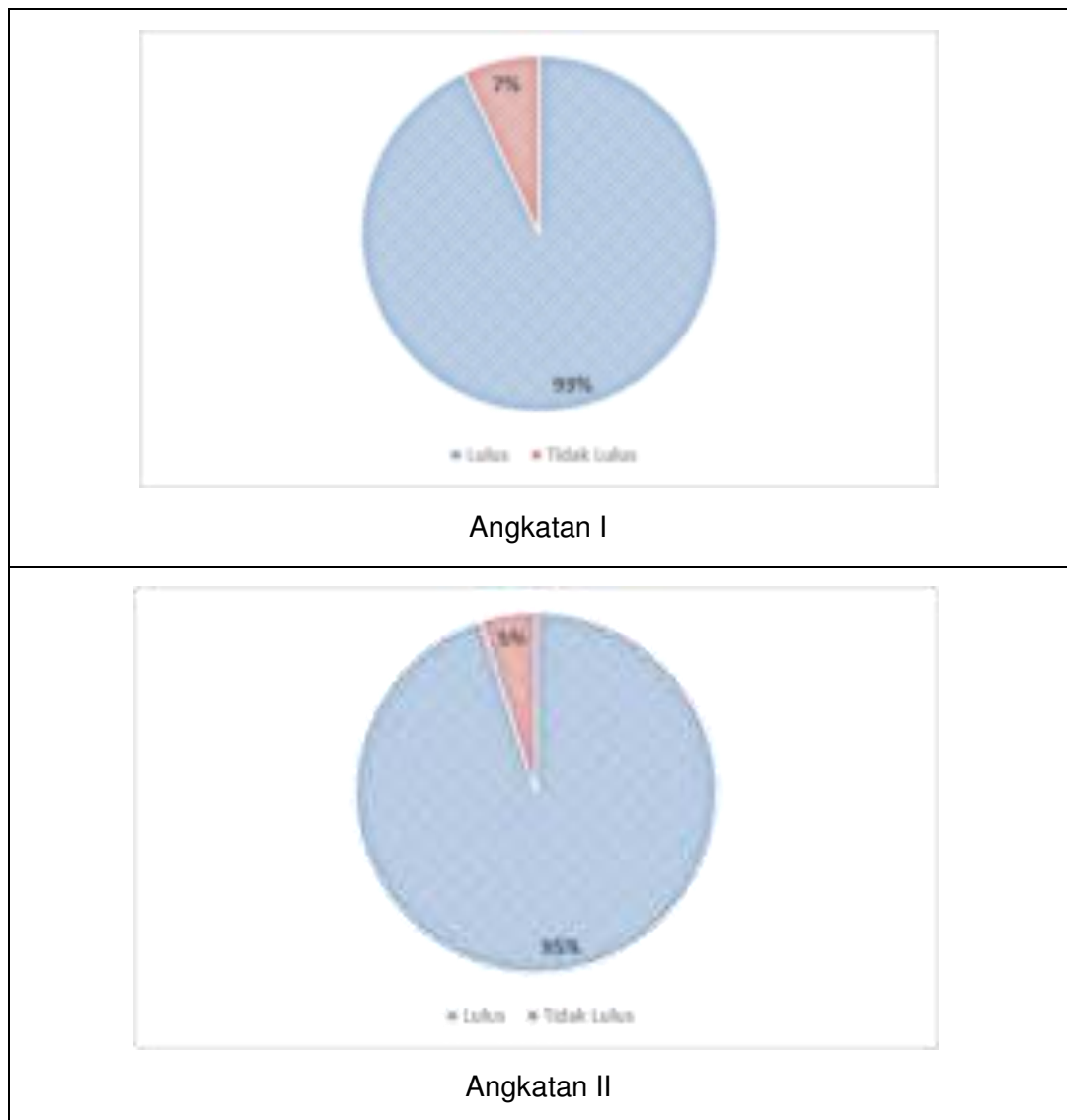


Angkatan I



Angkatan II

✓ Persentase Kelulusan



Berdasarkan hasil data yang telah kami sampaikan diatas, dapat dilihat bahwa dalam pelaksanaan Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan dengan metode *e-Learning* Angkatan I dan II ada total 7 (angkatan I : 4 orang, angkatan II : 3 orang) dari 113 peserta atau sekitar 6,2% yang gagal untuk mencapai standart nilai kelulusan yang telah ditetapkan, baik dari aspek nilai keaktifan partisipasi maupun dari hasil nilai ujian yang diraih peserta pelatihan tersebut. Dari dua aspek penilaian, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab gagalnya peserta mencapai nilai kelulusan pelatihan kali ini, berikut adalah faktor-faktor yang dapat kami analisa melalui komunikasi secara online pada grup Whatsapp yang telah dibentuk selama pelatihan berlangsung, diantaranya :



1. Tidak memenuhi Prosentase Keaktifan

Peserta tidak mengikuti rangkaian sesi yang diselenggarakan oleh para pengampu materi / Widyaiswara, dalam hal ini, terdapat satu peserta yang tidak mampu memenuhi standard kelulusan *activity completion*.

2. Tidak memenuhi Nilai Ujian / Tidak upload materi aktualisasi

Salah satu syarat terpenuhinya penilaian kelulusan adalah upload materi aktualisasi, selama tenggang waktu yang telah ditentukan dan diberikan. Sebelumnya telah diberikan kesempatan kepada para peserta yang tidak mampu memenuhi nilai kelulusan untuk melakukan remedial dengan upload laporan aktualisasi, tetapi beberapa peserta masih ada yang tidak melakukan upload, sehingga hal tersebut berdampak terhadap nilai akhir kelulusan.

1.4. Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian TA 2020 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian diselenggarakan selama 12 (dua belas) hari mulai tanggal 29 Agustus – 9 September 2020 yang diikuti oleh 160 peserta yang terbagi dalam 2 (dua) angkatan dari 10 Kantor Wilayah di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan melalui metode PJJ dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi Zoom Meeting dan aplikasi E-Learning.

Adapun tujuan pelaksanaan pelatihan ini adalah untuk memberikan pemahaman secara teknis tentang Pengawasan Keimigrasian sehingga dapat menerapkan pengawasan dan penindakan keimigrasian secara tepat, teliti, dan terkoordinasi.

Peserta dibekali pelatihan sebanyak 68 Jam Pelajaran (JP) dengan menghadirkan Widyaiswara dari BPSDM Hukum dan HAM serta metode pelatihan yang variatif seperti forum diskusi, *chatting*, tanya jawab, belajar mandiri dan ujian *online/offline*.

Sebelum menyelenggarakan kegiatan tersebut, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BPSDM Hukum dan HAM terkait penyelenggara menyinkronkan jalannya kegiatan



sehingga dapat berjalan dengan baik, baik kepada BPSDM Hukum dan HAM maupun Bapelkes Semarang sebagai tempat penyelenggara diklat.

Hasil capaian Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Metode PJJ :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	ANGGARAN	PENYERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis Pengawasan Keimigrasian Metode PJJ	29 Agustus – 9 September 2020	160 peserta	155 peserta	5 peserta	Rp 48.800.000	Rp 48.800.000

1.5. *Pelatihan Teknis Rating Jaga Navigasi TA 2020*

Pelatihan Teknis Rating Jaga Navigasi diselenggarakan selama 75 hari mulai tanggal 5 Oktober – 18 Desember 2020 yang diikuti oleh 2 (dua) orang peserta dari Lapas Batu Nusakambangan. Pelaksanaan diklat ini bekerja sama dengan Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) Semarang. Badiklat Jateng dan PIP Semarang bersinergi sebagai satu sistem dan meningkatkan kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pelatihan antara Kementerian Hukum dan HAM dengan PIP Semarang dan untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) untuk pegawai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan.

Adapun tujuan dari pelaksanaan Diklat ini, diharapkan dapat meningkatkan keahlian dan/atau keterampilan serta mendapatkan sertifikasi khususnya petugas juru mudi kapal yang dibutuhkan dalam operasional kapal negara di pulau Nusakambangan yang berada di Lingkungan Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah.

Sebagai bentuk kerja sama antara Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan PIP Semarang, kedua pihak menandatangani MoU atau nota kesepahaman yang disaksikan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Mengingat jangkauan Kemenkumham yang sangat luas dan tersebar hingga ke perbatasan, sekaligus adanya kepemilikan kapal-kapal negara dengan berbagai fungsinya, Sertifikasi Bidang Kepelautan menjadi hal yang penting demi tercapainya pelayanan publik prima. Kegiatan ini tentunya akan menjadi

bahan laporan inovasi kepada pimpinan sehingga ke depannya dapat terlaksana kembali Diklat Kepelautan yang mampu mendatangkan lebih banyak peserta.



Penandatanganan MoU dan penyerahan plakat

Pelatihan yang dilaksanakan secara tatap muka di masa pandemi covid-19 ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang disyaratkan, yaitu dengan menunjukkan hasil Rapid Test Covid-19 pada saat kedatangan dan menjalani tes kesehatan di PIP Semarang.



Peserta pelatihan Teknis Rating Jaga Navigasi menjalani tes kesehatan



Pemberian paket multivitamin kepada peserta

Sertifikasi yang dibutuhkan pertama kali adalah Basic Safety Training (BST), dimana pelatihan akan dilaksanakan selama 12 hari. Peserta akan menerima pembelajaran materi dan praktik pada kelas yang diampu langsung oleh pengajar dari PIP Semarang.



Praktik Keselamatan di Laut



Simulasi Pelepasan Inflatable Life Raft

Hasil capaian Pelatihan Teknis Rating Jaga Navigasi :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	ANGGARAN	PENYERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis Rating Jaga Navigasi	5 Oktober – 18 Desember 2020	2 peserta	2 peserta	-	Rp 67.840.000	Rp 62.474.000

1.6. Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XX TA 2020 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)

Pelatihan Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XX merupakan pelatihan fungsional pertama yang diselenggarakan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode PJJ selama 23 hari mulai tanggal 13 November – 7 Desember 2020 yang diikuti oleh 40 peserta dari 10 Kantor Wilayah di lingkungan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Peserta tersebut merupakan PNS Kemenkumham Tahun 2018 yang diangkat sebagai memiliki Pejabat Fungsional Analis Keimigrasian Ahli Pertama.

Peserta dibekali dengan materi sebanyak 22 Jam Pelajaran (JP) dan 6 JP NS dengan menghadirkan para pengajar dari BPSDM Hukum dan HAM, Pimti Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan pengajar dari Kanwil BPN Provinsi Jawa Tengah dengan metode pelatihan berupa e-learning, ceramah, diskusi interaktif, latihan, simulasi, visitasi.

Sebelum menyelenggarakan kegiatan tersebut, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tentunya melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BPSDM Hukum dan HAM serta Direktorat Jenderal Keimigrasian guna mendapat pedoman penyelenggaraan diklat fungsional sehingga pelatihan tersebut dapat berjalan dengan baik.





Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Angkatan XX mengikuti diklat secara virtual melalui aplikasi Zoom Meeting

Hasil capaian Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Metode PJJ :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	ANGGARAN	PENYERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian Ahli Pertama Metode PJJ	13 November – 7 Desember 2020	40 peserta	40 peserta	-	Anggaran Ditjen Imigrasi	Anggaran Ditjen Imigrasi

1.7. Pelatihan Teknis Protokoler

Pelatihan Teknis Protokoler dilaksanakan secara klasikal selama 4 (empat) hari mulai tanggal 15 – 18 Desember 2020 di Pusdiklat PMI Provinsi Jawa Tengah yang diikuti oleh 40 peserta dari jajaran Kantor Wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan D.I.Yogyakarta. Pelatihan ini disesuaikan pada analisa kebutuhan diklat yang disusun oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam rangka peningkatan *softskill* di bidang keprotokolan. Tujuan pelaksanaan pelatihan ini ialah untuk mensinergikan aturan keprotokolan negara dengan aturan Kemenkumham guna memperoleh aturan yang baru dalam pelaksanaan keprotokolan. Peserta pelatihan dibekali pelatihan sebanyak 26 JP dengan menghadirkan pengajar dari BPSDM Hukum dan HAM, Biro Umum Sekretariat Jenderal, Kanwil Jawa Tengah, serta Koordinator Penyiar TVRI dengan metode pembelajaran berupa ceramah, diskusi interaktif dan praktikum.

Sebelum menyelenggarakan pelatihan tersebut, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan BPSDM Hukum dan HAM dan Pusdiklat PMI Provinsi Jawa Tengah. Pelatihan ini merupakan pelatihan yang pertama kali dilaksanakan secara klasikal selama masa pandemi. Namun demikian, dalam rangka terselenggaranya kegiatan tersebut Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tetap menerapkan protokol kesehatan 3M (mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak) yang ketat yang dirangkai dengan *rapid test* bagi seluruh peserta dan panitia untuk memastikan bahwa seluruhnya dalam keadaan sehat sesuai dengan arahan Kepala BPSDM Hukum dan HAM.



Rapid test bagi peserta dan panitia diklat



Penerapan protokol kesehatan selama pelatihan

Pelatihan ini dibuka oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM secara virtual dan dihadiri oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM yang mewakili Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah, Ketua PMI Provinsi Jawa Tengah serta para Kepala UPT Kemenkumham di Semarang.



Pembukaan Pelatihan Teknis Protokoler TA 2020



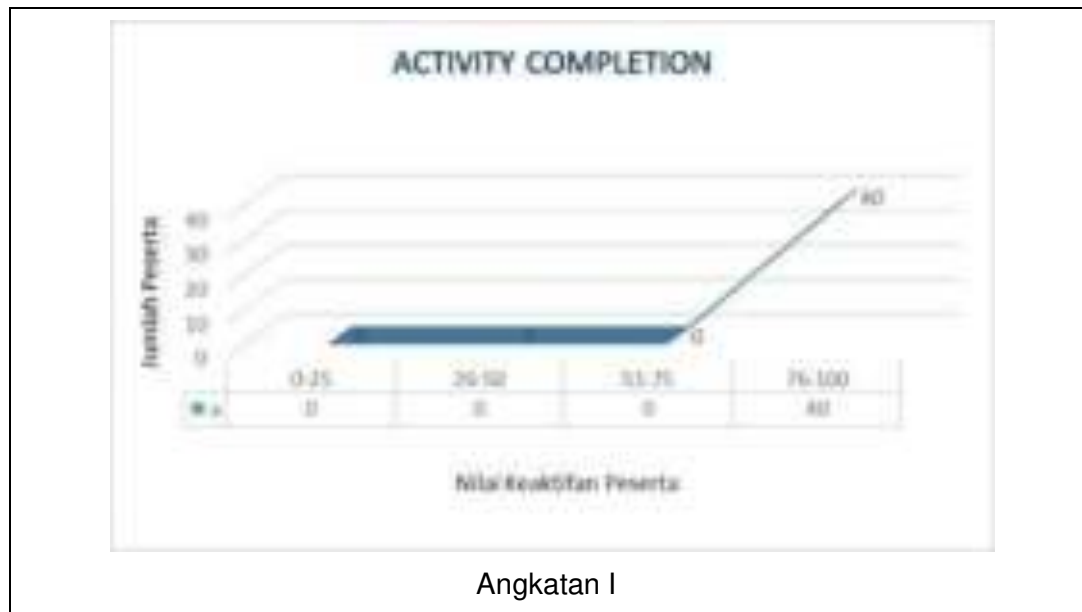
Praktik Master of Ceremony (MC)

Hasil capaian Pelatihan Teknis Protokoler :

N O	NAMA KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANAAN	TARGET	LULUS	TIDAK LULUS	ANGGARAN	PENYERAPAN
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pelatihan Teknis Protokoler	15-18 Desember 2020	40 peserta	40 peserta	-	Rp 187.468.000	Rp 137.892.863

Hasil evaluasi Pelatihan Teknis Protokoler :

✓ Nilai Partisipasi Keaktifan



✓ Nilai Ujian Peserta

No.	Nama	Satker	Pre Test	Nilai Pengajar		Post Test	Total Nilai	Ratas Nilai
				Sikap	Tugas			
1	Afri Sasongko Ady Putra	Lapas Kelas IIA Yogyakarta	100	95	95	70	360	90
2	Yoga Bagus Tri Mulyanto	Lapas Narkotika Klas IIA Pamekasan	80	90	90	100	360	90
3	Tomi Susanto	Lembaga Pemasarakatan Kelas I Batu	90	85	90	90	355	89
4	Anggoro	Kanim Pematang	70	90	95	90	345	86
5	Deny Pradita Tri Handaru	Rutan Kelas IIB Wonosari	80	90	95	80	345	86
6	Indra Doly	Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta	90	85	90	80	345	86
7	Slamet Santoso	LPKA Kelas II Yogyakarta	80	90	95	80	345	86
8	Arizal Nurwahyu Ramadhan	Lapas Kelas I Surabaya	70	90	90	90	340	85
9	Raden Bhaskoro Nugraha Poetra	Rutan IIB Wates	80	90	90	80	340	85
10	Damas Prihandoko	Rupbasan wates	80	85	90	80	335	84
11	Hari Kusdiyanto	Lembaga Pemasarakatan IIA Jember	70	85	90	90	335	84
12	Jovandi Alfi Syahrin	Kantor Wilayah Kemenkumham Jatim	70	90	95	80	335	84
13	Anton heryanto	Kanwil Kemenkumham Jateng	70	95	95	70	330	83
14	Debby Octaerdiyani	LPP Klas IIA Malang	70	95	95	70	330	83
15	Suryo Adi Saputro	Lapas Kelas IIA Purwokerto	60	90	90	90	330	83
16	Apit Azri Assafa	Lapas Kelas IIA Purwokerto	70	85	90	80	325	81
17	Dini Meilinda Nur C	Lapas Batu	70	90	95	70	325	81
18	Saifurrahman Hadi	Lapas Magelang	70	90	95	70	325	81
19	Rahajeng	Lapas Malang	60	95	95	70	320	80



20	Try Ikhsan Maulana	Surabaya	60	95	95	70	320	80
21	Arif Guntur Saputra	Kementerian hukum dan HAM	50	85	90	90	315	79
22	Rohyati	Badiklat Jateng	60	85	90	80	315	79
23	Ahmad Nuriyan Masyhar	Lapas Kelas IIA Bojonegoro	50	90	95	70	305	76
24	Akbar Mandala Putra	Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo	60	90	90	60	300	75
25	Pregas galang bima wicaksana	Lapas Kelas 1 Madiun	40	85	85	90	300	75
26	Vitas Giri Luke	Bapas Kelas I Semarang	40	90	95	70	295	74
27	Ahmad Sofyan	Lapas Pekalongan	30	85	90	80	285	71
28	Andikha Danang Kurniawan	Lapas Kelas IIA Magelang	40	85	90	70	285	71
29	Budi waluyo	Imigrasi Kelas I Non TPI Pati	40	85	90	70	285	71
30	Isti Nurhidayah	Lapas Perempuan Semarang	0	90	95	90	275	69
31	Adi Jaya Putra	Rumah Tahanan Negara Bantul	60	85	85	40	270	68
32	Najla Putra Rovindra	Lapas Kelas I Semarang	90	85	90	0	265	66
33	Fariz Ardani	Kanwil Kemenkumham Jateng	0	85	95	80	260	65
34	Ikhsan Setiawan	Rutan kelas IIA Yogyakarta	0	90	90	80	260	65
35	Mochyasofyan Noor Diansyah	Kanwil Kemenkumham D.I Yogyakarta	0	95	95	70	260	65
36	Fadzkkir Sukkal Abdillah	Lapas Kelas IIA Kediri	30	90	95	40	255	64
37	Muhamad Arfiyanto	Kanwil Kemenkumham Jateng	0	90	95	70	255	64
38	Ondi henang yunianto	Lapas Narkotika Kelas IIA Yogyakarta	70	85	90	0	245	61
39	Bagus Paras Etika	Kanwil Kemenkumham Jateng	0	90	95	0	185	46
40	Petera Pandji Perdana	Kanwil Kemenkumham Jateng	0	85	85	0	170	43

1.8. *Pelatihan Public Speaking*

Selain pelatihan yang telah dijabarkan di atas, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah juga menyelenggarakan pelatihan peningkatan soft skill kepegawaian untuk internal Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah, yaitu Pelatihan *Public Speaking* yang dilaksanakan di Hotel Griya Persada Bandungan pada tanggal 26 Oktober 2020. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pegawai Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan menghadirkan *Communication Coach*. Pelatihan *Public Speaking* diselenggarakan agar pegawai dapat meningkatkan kualitas mereka dalam berbicara di depan umum sehingga mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada *stakeholder*. Pelatihan ini fokus dalam membangun kepercayaan diri pegawai ketika berbicara di depan publik. Para pegawai mendapatkan pelatihan olah vokal dan intonasi dalam berbicara, menyusun mind map ketika berbicara di depan umum secara spontan, serta sikap tubuh yang tepat ketika mengajak audiens untuk ikut berpartisipasi.



Pelatihan Public Speaking diselingi dengan permainan atraktif

2. Kemenkumham Corporate University

Dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai dan pemenuhan kewajiban pegawai untuk mengikuti pelatihan selama minimal 20 Jam Pelajaran (JP) per tahun, Kementerian Hukum dan HAM telah mencanangkan Kemenkumham Corpu dengan sistem yang lebih variatif sehingga pelatihan tersebut tidak harus berupa klasikal ataupun e-learning namun juga bisa melalui coaching, mentoring, atau pembelajaran mandiri.

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sebagai perpanjangan tangan dari BPSDM Hukum dan HAM turut mengembangkan inovasi demi mewujudkan sasaran untuk meningkatkan kualitas SDM Kemenkumham. Inovasi tersebut adalah *Badiklat Learning Center* (BLC). *Badiklat Learning Center* merupakan portal pembelajaran mandiri yang dapat diakses melalui laman lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id. pada portal ini terdapat materi dan soal dan berbagai fitur yang memudahkan user dalam melakukan pembelajaran mandiri.

Website *Badiklat Learning Center* diluncurkan dan diresmikan secara langsung oleh Plt. Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Min Usihen, SH, MH bertepatan dengan kegiatan Pembukaan Pelatihan Teknis Yankomas pada tanggal 18 Februari 2020.



Selain *Badiklat Learning Center* (BLC) , memdia pembelajaran lain yang juga dikembangkan oleh *Badiklat* Hukum dan HAM Jawa Tengah antara lain *Community of Practise* (CoP), *Podcast*, dan *Webinar*.

2.1. *Community of Practise (CoP)*

Community of Practices atau Komunitas Belajar menjadi terobosan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam menyasati pembelajaran di masa Pandemi Covid-19. Pada tahun 2020 Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah menyelenggarakan 4 (empat) kegiatan CoP dengan total peserta sebanyak 589 peserta dengan mengangkat berbagai tema antara lain :

- *Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM*

Community of Practise yang pertama kali diselenggarakan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mengusung tema “Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM”. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 18 – 19 Mei 2020 dengan mengundang Kepala BPSDM Hukum dan HAM serta Kepala Biro Perencanaan dan Kepala Bagian Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan sebagai narasumber dan diikuti oleh



- *Mewujudkan Pengadaan BAMA yang Pasti*

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan kegiatan *Community of Practice* untuk yang kedua kalinya secara virtual pada tanggal 9 Juni 2020. *Community of Practice* kali ini diikuti oleh 180 orang peserta terdiri atas para Kepala UPT se-Jawa Tengah beserta pokja pemilihan pengadaan



BAMA dan Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barjas pada 10 Kantor Wilayah. Kegiatan ini dimoderasi oleh Kepala Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah sekaligus membuka kegiatan yang mengangkat tema “Mewujudkan Pengadaan BAMA yang PASTI”, dengan menghadirkan Kepala Biro Pengelolaan BMN Setjen selaku Kepala UKPBJ Kemenkumham RI, Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi Ditjen Pas Kemenkumham RI, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, dan Kasubdit Advokasi Pemerintah Pusat Bidang Polhukam dan PMK Direktorat LKPP, Kepala Divisi Administrasi dan Kepala Bagian Umum Umum Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah. Adanya kegiatan ini memantik diskusi menarik tentang permasalahan kondisi pengadaan BAMA yang berada di satuan kerja. Salah satunya kondisi geografis satker menjadi salah satu penyebab terjadinya kekurangan anggaran pengadaan BAMA, dikarenakan harga satuan yang tercantum pada DIPA masih merupakan harga standar tanpa perhitungan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya.



- *Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Keimigrasian*

Kegiatan *Community of Practices* ketiga ini diselenggarakan pada tanggal 7 Juli 2020 ini mengusung tema “Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Keimigrasian” dan diikuti oleh 80 peserta dengan mengundang Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Kadiv Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah, dan Kasubdit Pengelolaan dan Analisis Dokumen Perjanjian, sebagai Narasumber.

Pembahasan ini penting untuk terkait pembangunan kepercayaan publik terhadap Kemenkumham serta etika dalam pelayanan keimigrasian. Kegiatan ini diakhiri dengan pelaksanaan post tes untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta setelah menerima materi.



- *Optimalisasi Peran dan Fungsi Kehumasan di Satuan Kerja*

Hubungan Masyarakat merupakan strategi membangun relasi baik dengan khalayak dalam membangun citra positif. Meski begitu, peran dan fungsi Humas sebagai jembatan antara instansi dengan khalayak sering direduksi ke dalam fungsi sempit, yaitu hanya memberitakan kegiatan instansi saja.



Community of Practice kembali hadir di bulan Juli dengan mengusung tema Optimalisasi Peran Humas di Satuan Kerja yang diselenggarakan pada tanggal 23 Juli 2020. Kegiatan diikuti peserta Tim Humas Kanwil dan UPT pada 10 Kantor wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) angkatan. Pada kesempatan ini, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mengundang Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama serta Kasubag Humas, Pers, dan Media untuk menjadi Narasumber yang dimoderasi oleh Kepala Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah. Dasar dilaksanakannya kegiatan ini sehubungan dengan peran kehumasan dalam membangun strategi relasi baik dengan khalayak untuk membangun citra positif.

Biro Humas pada dasarnya memiliki fungsi pembinaan. Humas didorong untuk menerbitkan info yang bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama, Pagar Butar Butar, menyampaikan bahwa saat ini telah dilakukan perbaikan dalam tugas dan fungsi Humas agar dapat menciptakan dan membangun citra positif Kementerian.

- *Peran dan Inovasi Bapas dalam Pembimbingan dan Pengawasan Klien pada Masa New Normal*

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Balai Pemasyarakatan (Bapas). Bagaimana peran dan inovasi dapat dilakukan oleh Bapas di Era New Normal membutuhkan kebijakan baru agar dapat memaksimalkan peran Pembimbing Kemasyarakatan.



Community of Practice ini dilaksanakan pada tanggal 16 September 2020 dengan mengusung tema “Peran dan Inovasi Bapas dalam Pembimbingan dan Pengawasan Klien pada masa New Normal”. Kegiatan diikuti oleh 40 peserta Pembimbing Kemasyarakatan dari 10 Kantor Wilayah dengan menghadirkan Pembimbing Kemasyarakatan Utama Ditjen Pemasyarakatan, Kakanwil Kemenkumham Jateng, dan Kepala Bapas Semarang sebagai Narasumber dan dimoderasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Madya Kanwil Jateng, A. Faedhoni.

Pembahasan pada tema kali ini terkait koordinasi dan sinergi Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas dalam melakukan terobosan untuk memudahkan pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan pada situasi era new normal.





2.2. *Podcast*

Podcast adalah siaran non-streaming yang disampaikan melalui audio atau audio-visual yang disajikan dalam bentuk episode. *Podcast* menjadi salah satu sarana pembelajaran yang dilakukan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam mewujudkan Kemenkumham Corpu, terutama dalam masa pandemi. Pada tahun 2020 Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah mengangkat dan menayangkan 8 (delapan) episode *Podcast* dengan tema yang beragam seperti :

- Lima Kompetensi ASN
- Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan
- Konsep Dasar dan Karakteristik Hak Asasi Manusia
- Deklarasi HAM, Konvensi Anti Penyiksaan
- IKPA, Tanggung Jawab Kita Semua para Pelaksana Kegiatan di Seluruh Satuan Kerja
- Pos Yankomas di UPT Tingkatkan Oelayanan HAM di Daerah
- Tips Penting yang Perlu Diperhatikan oleh Satker dalam Meraih Predikat WBK/WBBM
- Kebutuhan Jabatan Fungsional dan Peran Asesor

2.3. *Webinar*

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah menyelenggarakan Webinar dengan tema “Strategi Penguatan, Sinergi, dan Kolaborasi dalam rangka Pembimbingan & Pengawasan Klien Pemasyarakatan secara Efektif dan Efisien di Era New Normal” secara *live* pada tanggal 19 November 2020 dengan mengundang Guru Besar FISIP Universitas Indonesia sekaligus Komisioner Ombudsman RI sebagai *keynote speaker* serta Kakanwil dan Kadivpas Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah dan Kepala Bapas Kelas I Semarang sebagai narasumber. Kegiatan ini diikuti oleh Kegiatan ini diselenggarakan sebagai penguatan koordinasi dan sinergitas Pembimbing Kemasyarakatan dalam rangka proses pelaksanaan Asimilasi klien pemasyarakatan di Era New Normal.



Kegiatan Webinar melalui aplikasi Zoom dan Youtube

3. Pembangunan Gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah mendapat amanat dan kepercayaan untuk memiliki sarana dan prasarana internal guna mendukung pelaksanaan tugas fungsi penyelenggara pendidikan dan pelatihan di wilayah seperti pembangunan gedung kantor dan bangunan, pengadaan kendaraan bermotor, pengadaan perangkat pengolah dan komunikasi, serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran. Pada Tahun Anggaran 2020, Balai Diklat Hukum dan HAM menerima alokasi anggaran sebesar Rp 40.211.945.000 pada layanan sarana dan prasarana yang mana anggaran sebesar Rp 35.338.802.000 dialokasi untuk pembangunan gedung dan bangunan dan sisanya sebesar Rp 4.873.143.000 digunakan untuk pengadaan kendaraan bermotor, perangkat pengolah data dan komunikasi, serta fasilitas perkantoran.

Gedung kantor tersebut dibangun di atas lahan seluas 4.500 meter persegi yang terletak di Jalan Raya Moch Ichsan, Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang. Pembangunan gedung dilakukan dalam 2 (dua) tahap yang mana Tahap I dilaksanakan pada tahun 2020. Adapun sarana yang dibangun pada tahap I ini antara lain gedung kantor utama, auditorium, kamar asrama, ruang kelas, ruang makan, serta fasilitas umum lainnya seperti ruang laktasi dan toilet.



Sebelum dilakukan pembangunan, maka terlebih dahulu dilakukan pemilihan penyedia jasa pekerjaan. Adapun pemenang tender untuk tiap paket pekerjaan :

Paket Pengadaan	Nama Perusahaan
Jasa Konsultansi Penyusunan Masterplan dan DED Perencanaan Gedung Bangunan	CV Skalatis
Jasa Konsultansi Perencanaan Pagar Keliling, Tapak dan Halaman	PT ATMA
Jasa Pelaksana Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor	PT Mega Bintang Abadi
Jasa Pelaksana Konstruksi Pembangunan Pagar Keliling, Tapak dan Halaman	PT Anvemy Mulia Abadi
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor	CV Nirmana
Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pagar Keliling, Tapak dan Halaman	PT Bowita Proporsi Utama

Tanggal 3 September 2020 menjadi hari yang bersejarah bagi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dengan diselenggarakannya acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung. Acara ini dihadiri secara langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Bambang Rantam Sariwanto dengan didampingi oleh Kepala BPSDM Hukum dan HAM, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Sekretaris Daerah Kota Semarang, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham D.I.Yogyakarta, Kepala UPT Kemenkumham di wilayah Semarang, Forkopimda Semarang, dan Lurah Wates.



Acara Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah



Progress Pembangunan Gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Pembangunan Tahap I gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah selesai dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Dengan telah berdirinya gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah maka diharapkan kegiatan pelatihan dapat diselenggarakan di gedung ini dan kegiatan operasional perkantoran siap untuk dilaksanakan pada bulan Januari 2021 mendatang.



Tampak Luar Gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah



Ruang kantor



Lobby utama



Auditorium



Ruang teater



Ruang kelas



Ruang kamar/asrama



Ruang makan



Toilet

B. Analisa Capaian Indikator Kinerja Utama

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2020 telah ditetapkan **sasaran kinerja** Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu “*Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Kantor Wilayah*” dan **indikator kinerja** “*Kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah*” dengan **target** sebesar 80%.

Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melakukan monitoring dan evaluasi pada beberapa satuan kerja alumni pelatihan dengan jumlah responden sebanyak 100 orang. Pengukuran kinerja penyelenggaraan pelatihan tersebut dilakukan melalui pengisian form yang berisi pertanyaan seputar penyelenggaraan diklat. Dari hasil tersebut diperoleh sebanyak 85% responden menyatakan “Sangat Baik” dengan penyelenggaraan pelatihan dan sebanyak 15% menyatakan “Baik”.

Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Target	Capaian
Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di Kantor Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	%	80	85

Faktor yang mempengaruhi tercapainya target tersebut antara lain :

- Pelatihan yang diselenggarakan merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh pegawai untuk mendukung peningkatan kinerja mereka;
- Dalam masa pandemi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah tetap berkomitmen dalam pengembangan kompetensi pegawai yaitu dengan menyelenggarakan pelatihan berbasis online seperti e-learning dan pembelajaran jarak jauh;
- Para Widyaiswara yang dihadirkan baik secara klasikal maupun daring merupakan pegajar yang kompeten dan ahli di bidangnya;
- Para panitia penyelenggara juga aktif dalam memberikan informasi dan pendampingan selama pelatihan berlangsung;
- Hasil pelatihan yang diterima oleh para peserta sangat bermanfaat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini dirasakan oleh para pejabat pengawas yang di satuan kerja peserta yang juga menjadi responden evaluasi.

C. Kendala atau Hambatan dan Langkah Penyelesaiannya

Kendala yang dihadapi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :

1. Pelatihan non klasikal yang memanfaatkan jaringan internet seperti pelatihan metode PJJ, sarana yang paling diperlukan adalah koneksi internet. Hal-hal yang kami temui dikeluhkan oleh peserta adalah koneksi yang buruk atau tidak stabil sehingga peserta keluar dari aplikasi Zoom Meeting saat koneksi terputus. Hal ini tentunya menjadi kendala bagi peserta dalam mengikuti pelatihan.
2. Selama pandemi Covid-19, pelatihan yang seharusnya dilaksanakan secara klasikal diubah menjadi pelatihan jarak jauh guna mencegah penyebaran virus. Namun dikarenakan pelaksanaannya secara daring pada satuan kerja masing-masing, maka pembelajaran pada saat materi berlangsung belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat peserta yang mendapat tugas atau panggilan dari pimpinan satuan kerja, sementara peserta seharusnya sedang mengikuti diklat meskipun telah dicantumkan dalam Surat Pemanggilan agar dibebastugaskan dari tugas sehari-hari.
3. Jumlah peserta yang tidak lulus dalam mengikuti pelatihan teknis pada TA 2020 adalah sebanyak 19 peserta. Hal ini disebabkan hal-hal berikut :
 - peserta tidak mengikuti rangkaian sesi pembelajaran sehingga mempengaruhi nilai keaktifan;
 - peserta tidak mengupload materi aktualisasi/laporan yang menjadi salah satu syarat kelulusan;
 - peserta tidak mengikuti pre test atau post test karena kendala koneksi internet.

Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah perlu menegaskan kembali bahwa pelatihan yang dilakukan secara daring sama halnya dengan pelatihan klasikal, yang berbeda adalah metode pelaksanaannya sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu perlu juga ditegaskan bahwa keikutsertaan peserta dalam tiap sesi pelajaran serta kelengkapan laporan menjadi bahan penilaian yang tentunya mempengaruhi nilai akhir peserta.



D. Analisa Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2019 dengan TA 2020.

Tabel 5. Perbandingan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Kegiatan	2019			2020		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
Jumlah lulusan yang mengikuti diklat berbasis kompetensi di Kantor Wilayah	340	1.289 orang	379,18	340	1.114 orang	327,68
Tersedianya layanan internal dukungan manajemen satker	1 layanan	1 layanan	100,00	1 layanan	1 layanan	100,00
Terselenggaranya layanan gaji dan perkantoran	1 layanan	1 layanan	100,00	1 layanan	1 layanan	100,00
Terlaksananya layanan sarana dan prasarana internal	-	-	-	1 layanan	1 layanan	100,00



Dari data di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun Anggaran 2019, jumlah lulusan pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 1.289 orang dengan persentase capaian 379,18%. Sementara pada Tahun Anggaran 2020 jumlah lulusan pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 1.114 orang dengan persentase capaian 327,68%. Jika dilihat berdasarkan persentase tersebut, capaian lulusan pada tahun 2019 lebih besar dibandingkan tahun 2020. Besarnya output capaian tahun 2019 dikarenakan adanya Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 TA 2019 sebanyak 506 peserta, sementara besarnya output capaian Tahun 2020 merupakan peserta yang mengikuti diklat teknis dan kegiatan pembelajaran Kemenkumham Corpu yang dikembangkan oleh Badiklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu Community of Practise (CoP) dan Podcast.
2. Untuk layanan dukungan manajemen satker dan layanan gaji dan perkantoran, capaian tahun 2019 dan 2020 sama, yaitu 100%.
3. Untuk layanan Sarana dan Prasarana Internal, Tahun 2020 menunjukkan adanya capaian kinerja ini sementara Tahun 2019 tidak tersedia layanan tersebut. Hal ini dikarenakan Balai Diklat Hukum dan HAM mendapat amanat dan kepercayaan untuk membangun gedung kantor baru dan belanja modal untuk pengadaan sarana dan prasarana internal.
4. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja kegiatan pada Tahun Anggaran 2020 lebih baik dibandingkan Tahun 2019.



E. Capaian Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM untuk Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. Penyerapan Anggaran Tahun 2020

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

	Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian Realisasi %
5249	Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah			
5249.001	Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM	719.192.000	662.367.299	92,10
5249.951	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	40.211.945.000	40.203.200.327	99,98
5249.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	273.438.000	238.541.607	87,24
5249.994	Layanan Perkantoran	1.676.569.000	1.599.472.852	95,40
	Jumlah	42.881.144.000	42.703.582.085	99,59

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa total pagu anggaran Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp 42.881.144.000. Dalam pelaksanaan kegiatan di Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah pada Tahun Anggaran 2020 telah menyerap anggaran senilai total Rp 42.703.582.085 atau sebesar 99,59% dari total anggaran.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Keuangan

Berikut kami sampaikan perbandingan capaian kinerja keuangan TA 2019 dengan TA 2020.

Tabel 7. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Hukum dan HAM	2019			2020		
	Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Penyerapan (Rp)	Capaian (%)
Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Wilayah						
<i>Penyelenggaraan Diklat Aparatur pada Balai Diklat Hukum dan HAM</i>	10.112.909.000	9.003.598.352	89,02	719.192.000	662.367.299	92,10
<i>Layanan Sarana dan Prasarana Internal</i>	-	-	-	40.211.945.000	40.203.200.327	99,98
<i>Layanan Dukungan Manajemen Satker</i>	196.690.000	191.973.000	97,60	273.438.000	238.541.607	87,24
<i>Layanan Perkantoran</i>	1.704.869.000	1.681.220.013	98,61	1.676.569.000	1.599.472.852	95,40
Jumlah	12.014.468.000	10.876.791.365	90,53	42.881.144.000	42.703.582.085	99,59



Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa :

1. Pada Tahun Anggaran 2019, capaian penyerapan anggaran penyelenggaraan diklat adalah sebesar Rp 9.003.598.352 dari pagu anggaran Rp 10.112.909.000 dengan persentase 89,02%. Sementara pada Tahun Anggaran 2020 capaian penyerapan anggaran penyelenggaraan diklat sebesar Rp 662.367.299 dari pagu anggaran 719.192.000 dengan persentase 92,10%.
Besarnya pagu anggaran Tahun 2019 dikarenakan alokasi dana untuk pelaksanaan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 TA 2019 yang cukup besar. Sementara nilai pagu anggaran Tahun 2020 jauh lebih sedikit dikarenakan dilakukan revisi anggaran pengalihan diklat klasikal menjadi e-learning dan metode PJJ yang tidak menyerap dana cukup besar. Meski demikian, jika dilihat dari persentase capaian penyerapan, maka dapat diketahui bahwa capaian penyerapan anggaran Tahun 2020 lebih baik dibanding Tahun 2019.
2. Pagu anggaran yang paling besar pada Tahun 2020 terdapat pada layanan Sarana dan Prasarana Internal dengan nilai Rp 40.211.945.000. Pada tahun ini Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa memiliki alokasi anggaran untuk pembangunan gedung kantor guna mendukung pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ASN Hukum dan HAM. Selain pembangunan gedung, anggaran tersebut juga dimanfaatkan untuk belanja modal sarana dan prasarana internal dan telah diserap sebanyak Rp 40.203.200.327. Dan dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa capaian penyerapan pada layanan cukup tinggi, yaitu sebesar 99,98%.
3. Untuk layanan Dukungan Manajemen Satker, penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 191.973.000 dari pagu anggaran 196.690.000 dengan persentase capaian penyerapan sebesar 97,60%. Sementara pada Tahun 2020 penyerapan anggaran sebesar Rp 238.541.607 dari pagu anggaran Rp 273.438.000 dengan persentase capaian 87,24%. Dari perbandingan tersebut dapat dilihat bahwa kinerja anggaran pada Tahun 2019 masih lebih baik dibanding Tahun 2020. Hal ini disebabkan biaya perjalanan untuk kegiatan Pemantauan dan Evaluasi tidak terserap maksimal karena pandemi Covid-19.
4. Pada layanan Perkantoran, penyerapan anggaran Tahun 2019 sebesar Rp 1.681.220.013 dari pagu anggaran Rp 1.709.869.000 dengan persentase capaian sebesar 98,61%. Sementara pada Tahun 2020 penyerapan anggaran



Tahun 2020 sebesar Rp 1.599.472.852 dari pagu anggaran Rp 1.676.569.000 dengan capaian penyerapan 95,40%.

5. Dari total capaian dan persentase penyerapan antara Tahun 2019 dan 2020 dapat dilihat bahwa persentase capaian Tahun 2019 sebesar 90,53% dan Tahun 2020 sebesar 99,59%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja anggaran Tahun 2020 lebih baik dibandingkan Tahun 2019.

The image shows a stack of numerous old, yellowed books. The pages are thick and have a warm, golden-brown hue, suggesting they are quite old. The books are stacked in a way that shows the edges of many pages, creating a textured, layered appearance. In the center of the image, there is a semi-transparent white rectangular area containing the text 'BAB IV' and 'PENUTUP' in bold, black, sans-serif font. The background is a soft, warm gradient, likely from a light source behind the books, creating a gentle glow around the edges of the pages.

BAB IV
PENUTUP



A. Kesimpulan

Dari hasil pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Capaian kinerja Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah TA 2020 :

Program	Kegiatan	Capaian Output	Kelulusan	
			Lulus	Gagal
Pelatihan Teknis dan Fungsional	Pelatihan Teknis untuk Pelaksana pada Pos Pelayanan Komunikasi Masyarakat TA 2020	61 orang	61 orang	-
	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Dasar TA 2020 Metode E-Learning	120 orang	113 orang	7 orang
	Pelatihan Teknis Pengamanan Tingkat Lanjutan TA 2020 Metode E-Learning	113 orang	106 orang	7 orang
	Pelatihan Pengawasan Keimigrasian TA 2020 Metode PJJ	160 orang	155 orang	5 orang
	Pelatihan Teknis Dinas Rating Jaga Navigasi TA 2020	2 orang	2 orang	-
	Pelatihan Fungsional Analisis Keimigrasian TA 2020 Metode PJJ	40 orang	40 orang	-
	Pelatihan Teknis Protokoler TA 2020	40 orang	40 orang	-
Jumlah		536 orang	517 orang	19 orang
Kemenkumham Corporate University	CoP : “Mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Satuan Kerja Berpredikat WBK/WBBM”	40 orang	40 orang	-
	CoP : “Mewujudkan Pengadaan BAMA yang Pasti”	129 orang	129 orang	-
	CoP : “Upaya Peningkatan Pelayanan Publik Keimigrasian”	88 orang	88 orang	-
	CoP : “Optimalisasi Peran dan Fungsi Kehumasan di Satuan Kerja”	256 orang	256 orang	-
	CoP : “Peran dan Inovasi Bapas dalam Pembinaan dan Pengawasan Klien pada Masa New Normal”	65 orang	65 orang	-
	Jumlah		578 orang	578 orang
	Podcast :			
	- Lima Kompetensi ASN			
	- Tugas dan Fungsi Pembimbing Kemasyarakatan			
	- Konsep Dasar dan Karakteristik Hak Asasi Manusia			
	- Deklarasi HAM, Konvensi Anti Penyiksaan			



	<ul style="list-style-type: none"> - IKPA, Tanggung Jawab Kita Semua para Pelaksana Kegiatan di Seluruh Satuan Kerja - Pos Yankomas di UPT Tingkatkan Oelayanan HAM di Daerah - Tips Penting yang Perlu Diperhatikan oleh Satker dalam Meraih Predikat WBK/WBBM - Kebutuhan Jabatan Fungsional dan Peran Asesor
	<p>Webinar : “Strategi Penguatan, Sinergi, dan Kolaborasi dalam rangka Pembimbingan & Pengawasan Klien Pemasyarakatan secara Efektif dan Efisien di Era New Normal”</p>
<p>Pembangunan Gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah</p>	

2. Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah yaitu “Kualitas Penyelenggaraan Pelatihan di Wilayah”, Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah telah melakukan evaluasi pada beberapa satuan kerja alumni peserta melalui pengisian form yang berisi pertanyaan seputar penyelenggaraan diklat. Dari hasil tersebut diperoleh sebanyak 85% responden menyatakan “Sangat Baik” dengan penyelenggaraan pelatihan dan sebanyak 15% menyatakan “Baik”.

Sasaran Kinerja	Indikator	Satuan	Target	Capaian
Penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan di Kantor Wilayah	Kualitas penyelenggaraan pelatihan di wilayah	%	80	85

3. Kendala yang dihadapi Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam pelaksanaan kegiatan antara lain :
- Koneksi internet yang buruk atau tidak stabil menjadi kendala peserta dalam mengikuti pelatihan jarak jauh.
 - Pembelajaran jarak jauh selama materi berlangsung belum optimal. Hal ini dikarenakan masih terdapat peserta yang mendapat tugas atau panggilan dari pimpinan satuan kerja, sementara peserta seharusnya sedang mengikuti diklat meskipun telah dicantumkan dalam Surat Pemanggilan agar dibebastugaskan dari tugas sehari-hari.
 - Terdapat 19 peserta yang tidak lulus dalam mengikuti pelatihan teknis pada TA 2020.

Langkah penyelesaian yang dapat dilakukan oleh Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah adalah perlu menegaskan kembali bahwa pelatihan yang dilakukan secara daring sama halnya dengan pelatihan klasikal, yang berbeda



adalah metode pelaksanaannya sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu perlu juga ditegaskan bahwa keikutsertaan peserta dalam tiap sesi pelajaran serta kelengkapan laporan menjadi bahan penilaian yang tentunya mempengaruhi nilai akhir peserta.

4. Berdasarkan data perbandingan kinerja kegiatan Tahun 2019 dan Tahun 2020, secara umum kinerja kegiatan pada TA 2020 lebih baik dibandingkan Tahun 2019. Hal ini terlihat dari jumlah lulusan pegawai yang mengikuti diklat sebanyak 1.114 orang dengan persentase capaian 327,68%, tercapainya layanan dukungan manajemen satker, layanan gaji dan perkantoran, serta layanan Sarana dan Prasarana Internal pada Tahun 2020.
5. Berdasarkan data perbandingan kinerja keuangan Tahun 2019 dan Tahun 2020, secara umum kinerja keuangan TA 2020 lebih baik dibanding Tahun 2019. Hal ini terlihat dari capaian penyerapan anggaran sebesar 99,59% atau sebesar Rp 42.703.582.085 dari total pagu Rp 42.881.144.000. Besarnya pagu anggaran Tahun 2020 dikarenakan adanya kegiatan pembangunan gedung Balai Diklat Hukum dan HAM Jawa Tengah serta pemenuhan sarana dan prasarana internal.

B. Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan beberapa kesimpulan tersebut maka perlu adanya tindak lanjut terhadap hambatan/permasalahan yang ada, yaitu dengan perlunya menegaskan kembali bahwa pelatihan yang dilakukan secara daring sama halnya dengan pelatihan klasikal, yang berbeda adalah metode pelaksanaannya sehingga tetap dibutuhkan perhatian dan konsentrasi dalam mengikuti pelatihan tersebut. Selain itu perlu juga ditegaskan bahwa keikutsertaan peserta dalam tiap sesi pelajaran serta kelengkapan laporan menjadi bahan penilaian yang tentunya mempengaruhi nilai akhir peserta.

